



KEBIJAKAN SWEDIA UNTUK MELAKUKAN IMPOR SAMPAH

THE SWEDISH'S POLICY OF IMPORTING WASTE

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan
Internasional (SI) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

**NUNIK ZULFIYAH
140910101034**

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Mahmudi dan Sarmi yang selalu memberi dukungan kepada saya.
2. Adik saya tersayang, Norma Amalia Sari, kakak saya Ichdatul Fitriyah dan Fuad Muzakki.
3. Saudara-saudara yang saya temukan di Jember : Ladia Aisah Andriana, Yurike Salza Bella Susanto, Dwi Ananda Violita, Ayuning Dwi Permatasari, Kamiliya Atikah, Luthfiatul Udhmah dan Aulia Savitri yang terus membagikan semangat, dorongan, motivasi dan pemikirannya. Merci Beaucoup! and I love you so much fellas!
4. A good friend in Sweden, Ehsan Al Doos yang telah membantu saya dalam menerjemahkan data dari Swedia dan meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Tack så mycket! Vi kanske kan ses över en fika någon gång?
5. Dosen pembimbing yang telah sabar menuntun dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

*“Hidup bisa memberikan segala pada barangsiapa tahu dan pandai menerima”
(Life can give everything to whoever tries to understand and is willing to receive
new knowledge)*

(Sanikem)¹

Atau

*“On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux”
(It is only with the heart that one can see rightly, what is essential is invisible to
the eye)*

(Antoine de St. Exupéry)²

¹ Pramoedya AnantaToer . 2002. *Bumi Manusia*. Yogyakarta : Hastra Mitra.

² Antoine de St. Exupéry. 1943. *Le Petit Prince*. Paris: Bonniers

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nunik Zulfiyah

NIM : 140910101034

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Kebijakan Swedia untuk Melakukan Impor Sampah” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya cantumkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya hasil jiplakan. Saya bertanggungjawab penuh atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Januari 2019

Yang menyatakan,

Nunik Zulfiyah

NIM 140910101034

SKRIPSI

KEBIJAKAN SWEDIA UNTUK MELAKUKAN IMPOR SAMPAH

SWEDISH'S POLICY OF IMPORTING WASTE

Oleh:

Nunik Zulfiyah

140910101034

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Honest Dody Molasy, S, Sos, M.A

Dosen Pembimbing Anggota : Adhiningasih Prabhawati, S.Sos, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Swedia untuk Melakukan Impor Sampah” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : 28 Januari 2019

Tempat : Ruang Ujian Bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
NIP 19610828 199201 1 001

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A
NIP 19761112 200312 1 002

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos, M.Si
NIP 19781224 200812 2 001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Supriyadi, M.Si
NIP 19580317 198503 1 003

Dr. Puji Wahono, M.Si
NIP 19600201 198702 1 001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 19580810 198702 1 002

RINGKASAN

Kebijakan Swedia untuk Melakukan Impor Sampah; Nunik Zulfiyah; 140910101034; 2019; 106 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pada tahun 2011 Swedia intens menerapkan impor sampah dari beberapa negara di sekitarnya seperti Norwegia, Inggris dan Irlandia. Impor sampah bahkan terus ditingkatkan kuantitasnya dalam tahun-tahun berikutnya. Swedia juga telah menargetkan Bulgaria, Rumania dan Italia untuk dijadikan sebagai eksportir yang memasok sampah untuknya di masa depan. Padahal sebelumnya negara Skandinavia ini berupaya keras menekan volume sampah dan mencegah pembuangannya ke *landfills* di setiap distriknya. Berbagai kebijakan yang sifatnya memaksa juga telah diterapkan, seperti larangan pembuangan sampah pada awal tahun 2000-an. Kurang dari 1% sampah yang tersisa dibuang ke *landfills* pada tahun 2011 karena sebelumnya manajemen sampah Swedia semakin baik dari waktu ke waktu berkat berbagai kebijakan yang telah diterapkan. Sebelumnya, Swedia berupaya keras untuk mencapai target *zero waste* terkait persoalan sampah di dalam negerinya. Swedia tentu memiliki alasan yang kuat dalam menerapkan kegiatan impor sampah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Swedia menerapkan impor sampah. Dalam penelitian ini, Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*literature Studies*). Data yang diperoleh merupakan data sekunder (*secondary data*) yang berasal dari buku, jurnal artikel, radio, berita dan beberapa *website* institusi Swedia. Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara eksplanasi untuk menggambarkan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini secara komprehensif.

Hasil yang didapatkan dari analisis data tersebut untuk penelitian ini menunjukkan bahwa alasan dari impor sampah yang dijalankan Swedia karena untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya dalam mode *clean energy*,

Kebijakan tersebut dipengaruhi oleh partai hijau di dalam negaranya yang telah menaikkan isu perubahan iklim di Swedia. Keduanya saling berkorelasi karena perkembangan industrialisasi yang pesat telah mendorong kenaikan tingkat konsumsi energi dan produksi sampah yang juga sejalan kenaikannya.



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kebijakan Swedia untuk Melakukan Impor Sampah”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Honest Dody Molasy, S.Sos, M.A selaku Dosen Pembimbing Utama dan Adhiningasih Prabhawati, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatiannya dalam penulisan skripsi ini;
2. Dosen Penguji Utama Drs. Himawan Bayu Patriadi, Ma., Ph.D. dan Dosen Penguji Anggota I Drs. Supriyadi, M.Si. serta Dr. Puji Wahono, M.Si. selaku Dosen Penguji Anggota II yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
3. Mrs. Jenny Westin selaku *Advisor for Public Procurement & Statistics* dan Mrs. Josefin Berglund selaku *Komunikator* dari Institusi Manajemen Sampah Swedia Avfall Sverige, yang telah banyak membantu memberikan data-data penelitian untuk karya ilmiah ini;
4. Bapak Ibu Dosen, staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Teman-teman Hubungan Internasional khususnya angkatan 2014 atas kebersamaan dan dukungannya selama berproses di Jurusan HI; dan
6. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap, skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 24 Januari 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMANMOTO	iii
HALAMANPERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.2.1 Batasan Materi	6
1.2.2 Batasan Waktu	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kerangka Konseptual	7
1.5.1 Konsep Energy Security	12
1.5.2 Green Politics Theory	7
1.6 Argumen Utama	19
1.7 Metode Penelitian	19
1.7.1 Metode Pengumpulan Data	19
1.7.2 Metode Analisis Data	20
1.8 Sistematika Penulisan	20
BAB 2. EKSISTENSI KELOMPOK ENVIRONMENTALIST DALAM POLITIK PEMERINTAHAN SWEDIA	22

2.1 Gambaran Umum Pemerintahan Swedia	25
2.2 Partai Hijau Swedia atau <i>Miljöpartiet de gröna</i> di Riksdag.....	30
2.3 Keterlibatan <i>Miljöpartiet de gröna</i> dalam Perkembangan Isu Lingkungan di Swedia	36
BAB 3. ISU SAMPAH & KEBUTUHAN ENERGI SWEDIA	40
3.1 Isu Sampah di Swedia.....	40
3.1.1 Kondisi Sampah di Swedia	41
3.1.2 Kebijakan Terkait Sampah di Swedia.....	45
3.1.3 Praktik Manajemen Sampah di Swedia	50
3.2 Kebutuhan Energi Swedia	53
3.2.1 Ketersediaan Energi di Swedia.....	54
3.2.2 Kebijakan Makro Swedia dalam Lingkup Regional Uni Eropa Terkait Keamanan Energi.....	57
BAB 4. ANALISIS URGENSI PENERAPAN IMPOR SAMPAH BAGISWEDIA	63
4.1 Pergeseran Mode Energi dari Energi Fosil ke <i>Clean Energy</i>	71
4.2 Pengaruh Kelompok Hijau Melalui Wacana Perubahan Iklim	91
BAB 5. KESIMPULAN	97
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Volume Produksi Sampah Domestik Swedia dari Tahun 2011-2017 (Ton)...	79
4.2 Data Pembagian Volume Sampah Rumah Tangga Yang Dikelola Dari Tahun 2011-2017	80
4.3 Daftar Jenis Energi Yang Dihasilkan dari Sampah dari Tahun 2011-2017	82
4.4 Matrix Perbandingan Energi Fosil vs <i>Waste-to-Energy</i> (<i>Clean Energy</i>)... 89-90	
4.5 Daftar Negara Produsen Nuklir Terbesar di Dunia Tahun 2003 (Konsumsi Berdasarkan Hitungan Mtoe).....	89
4.6 Daftar Penghasilan Pajak dari Energi di Swedia Tahun 2010 per-juta SEK... 91	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Jumlah MSW Yang dihasilkan Swedia dalam Hitungan Kilogram/kapita Dari Tahun 2001-2010	42
3.2 Daftar Pembagian Jenis Sampah Yang diproduksi Oleh Swedia	43
4.1 Jumlah Produksi Minyak Wilayah Laut Utara per Hari dari Tahun 2000-2016	63
4.2 Grafik Pergerakan Harga Minyak Mentah Brent per dolar/Barel di Wilayah Laut Utara Antara Tahun 2000-2014	64
4.3 Grafik Peningkatan Impor Sampah Swedia dalam Hitungan (Ton) Antara Tahun 2004-2017	78
4.4 Ilustrasi Proses Pengubahaan Sampah Menjadi Energi dalam Pabrik WTE...	74
4.5 Persentase Pembagian Pasokan Energi Yang Diimpor Swedia Dari Negara-negara Produsen Energi Minyak Tahun 2007	91
4.6 Grafik Konsumsi Minyak Swedia Yang Diperoleh Dari Hasil Impor	92
4.7 Grafik Konsumsi Produk Hasil Kilang Minyak Swedia Yang Diperoleh Dari Hasil Impor	93
4.8 Persentase Pembagian Pasokan Energi Yang Diimpor Swedia Dari Negara-negara Produsen Minyak Tahun 2011	97

DAFTAR SINGKATAN

- CFC's : *Clorofluorocarbons* (Klorin, Florin, Karbon, 3 atom oksigen yang merupakan bahan kimia atau molekul yang bisa merusak lapisan ozon)
- UNEP : *United Nations Environment Programme* (Program PBB untuk Lingkungan)
- OECD : *Organisation for Economic Co-operation and Development* (Organisasi untuk Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi)
- IEA : *International Energy Agency* (Organisasi Energi Internasional)
- APERC : *Asia Pacific Energy Research Centre* (Pusat Penelitian Energi Asia Pasifik)
- EPA : *Environmental Protection Agency* (Badan Perlindungan Lingkungan)
- ECSC : *European Coal and Steel Community* (Komunitas Baja dan Batu Bara Uni Eropa)
- EPBD : *Energy Performance of Building Directive* (Perintah Uni Eropa terkait Pembangunan Kinerja Energi)
- MP : *Miljopartiet de grona* (Partai Hijau Swedia)
- MSW : *Municipal Solid Waste* (Sampah Padat Kota)
- WTE : *Waste-to-Energy* (Sampah-ke-Energi atau Teknologi perbaikan energi dari sampah)
- CHP-Plant : *Combined Heat and Power-Plant* (Pabrik yang memproduksi Gabungan Panas dan Listrik)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi telah menjadi sebuah paradoks bagi masyarakat dunia. Keidentikannya dalam memperkuat peningkatan ekonomi melalui proses perluasan dan integrasi pasar telah mendorong tingkat pertumbuhan industri yang semakin pesat, sehingga kemudian membuat fenomena globalisasi berimplikasi pada serangkaian aktivitas ekonomi dan sosial manusia yang berjalan secara paralel dengan potensi ancaman terhadap lingkungan mereka (Nugroho, 2001: 3). Isu lingkungan menjadi salah satu dampak yang dihasilkan dalam era globalisasi, sehingga saat ini isu lingkungan menjadi kajian dalam hubungan internasional yang sifatnya semakin krusial. Faktor yang menjadi pendukung hal tersebut antara lain, pertumbuhan industri yang pesat sejalan dengan kenaikan populasi manusia dan kebutuhannya dan kemudahan akses teknologi yang semakin canggih telah menjadi stimulus dari intensifikasi budaya konsumerisme masyarakat dunia saat ini. Oleh karena itu, konsekuensi logisnya adalah volume sampah semakin mengalami peningkatan.

Sampah pada akhirnya menjadi problematika baru, tidak hanya dalam lingkup nasional bagi suatu negara karena dampak yang ditimbulkan sendiri merambah pada permasalahan yang bisa dirasakan oleh masyarakat global. Hal tersebut merupakan permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan *Chlorofluorocarbons*³ (CFCs) yang selanjutnya memberikan efek pada Global Warming (A. A., Perwita., & Y. M., Yani. 2005: 72). Kendati tidak secara langsung menyebabkan bencana yang besar, perubahan-perubahan yang telah terjadi memberi banyak konsekuensi bagi lingkungan tempat tinggal mereka dan bidang-

³*Chlorofluorocarbons* adalah suatu molekul atau bahan kimia yang mengandung 3 atom oksigen yang tersebar di stratosfer bumi yakni Karbon, Klorin dan Flourin. Senyawa ini tidak mudah terbakar dan tidak beracun. namun senyawa tersebut bisa menghancurkan lapisan ozon, sedangkan lapisan ozon berfungsi sebagai penyerap radiasi ultraviolet yang berbahaya bagi bumi karena menaikkan suhu bumi yang menyebabkan perubahan iklim. K., Malcolm. 1993. *Global Warming From Chlorofluorocarbons and Their Alternatives : Time Scales of Chemistry and Climate*. California : UC Irvine. diakses dari <https://escholarship.org/uc/item/0b34j525> pada 1 Desember 2017

bidang lainnya. Oleh karena itu, kebutuhan untuk melindungi lingkungan menjadi meluas saat ini.

Beberapa tahun terakhir, persoalan lingkungan mengarah pada masalah sampah. Bertepatan dengan Hari Bumi, para pengamat melakukan observasi terhadap lingkungan yang hasilnya menyatakan bahwa saat ini problematika mengerikan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia adalah masalah peningkatan sampah. Berdasarkan data statistik tahun 2017 yang dihasilkan oleh *UNEP*⁴ menunjukkan bahwa lebih dari separuh populasi dunia tidak memiliki akses terhadap pengumpulan sampah umum. Lebih jauh lagi para ahli mengatakan bahwa sampah sudah mencapai tingkat krisis. Hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan yang terus terjadi selama beberapa tahun terakhir. Bahkan berdasarkan data statistik yang dihasilkan oleh World Bank, menunjukkan bahwa sampah yang dihasilkan oleh negara-negara di dunia setiap hari mengalami kenaikan rata-rata sekitar 1,2 sampai 1,42 kg per-orang dan per-hari sehingga diperkirakan pada tahun 2025 tingkat sampah yang dihasilkan dunia menjadi 2,2 miliar ton pertahun dari yang sebelumnya 1,3 miliar ton pertahun dan akan melonjak menjadi 4 miliar ton pada tahun 2100. Peningkatan volume sampah dipengaruhi oleh laju perkembangan ekonomi dan *urbanisasi*⁵. Keduanya sangat berkorelasi dengan peningkatan pendapatan dan standar hidup yang sejalan dengan konsumsi barang yang dilakukan oleh masyarakat. Sampah yang menggunung menjadi persoalan yang menakutkan karena secara langsung akan berdampak pada terganggunya kesehatan lingkungan akibat pencemaran dan memburuknya kesehatan masyarakat. Selain itu persoalan tempat pembuangan juga menjadi masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara di dunia.

⁴ *UNEP* atau *The United Nations Environment Programme* merupakan suatu otoritas program lingkungan global yang berada di bawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang menetapkan agenda lingkungan global dan mempromosikan implementasi pembangunan berkelanjutan yang koheren dari dimensi lingkungan dalam sistem PBB dan berperan sebagai advokat yang berwenang untuk masalah lingkungan global. *UNEP*. 2017. *About UN Environment*. Diakses dari <https://www.unenvironment.org/about-un-environment> pada 4 Desember 2017.

⁵ Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *Urbanisasi* adalah perpindahan penduduk dari desa (kota kecil, daerah) ke kota besar (pusat pemerintahan) . KBBI Daring. (2016). *Urbanisasi*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Urbanisasi> pada 5 Desember 2017

Tempat pembuangan (*landfills*) menjadi persoalan utama yang meresahkan bagi kebanyakan negara yang ada di dunia, terutama negara-negara yang memiliki industri besar. Banyak negara-negara maju yang kekurangan fasilitas pembuangan sampah karena kelangkaan dan harganya yang semakin mahal, akibatnya negara-negara yang kurang maju menjadi target bagi tempat pembuangan sampah mereka. Sistem pengelolaan sampah yang efektif dan ramah lingkungan masih jarang sekali bisa dilakukan oleh sebagian besar negara di dunia, kendati pertumbuhan ekonomi negaranya cukup tinggi. Oleh karena itu, selama dua dekade terakhir perdagangan limbah berbahaya lintas batas negara marak terjadi dan menjadi isu utama bagi kesehatan lingkungan (Lipman, 2011). Ketersediaan tempat pembuangan bagi suatu negara pun belum cukup untuk mengatasi persoalan dari keseimbangan lingkungan. Karena pada dasarnya sampah yang dibuang ke tempat pembuangan tanpa dilakukan penyortiran yang benar akan berimplikasi pada pencemaran tanah. Sampah yang tertimbun di tempat pembuangan akan mengalami dekomposisi yang menghasilkan gas metan yang selanjutnya juga menjadi penyebab dari pencemaran udara, karena gas metan mengandung 23 kali lipat kekuatan dari gas CO².

Beberapa tahun terakhir negara-negara anggota OECD maupun non-OECD sebagian besar sedang diributkan dengan persoalan pengiriman sampah lintas batas negara. Karena sebagian besar negara-negara anggotanya merupakan negara maju dengan industri yang besar. Bahkan berdasarkan data yang disajikan oleh World Bank menunjukkan bahwa hampir separuh dari keseluruhan volume sampah yang dihasilkan oleh dunia berasal dari negara OECD (Hoornweg, et al., 2012). Kondisi tersebut dimungkinkan sebagai pemicu dilakukannya aktivitas ekspor oleh sebagian besar negara anggotanya. Kebanyakan dari mereka kurang bisa menangani sampah dengan baik dalam negerinya, sehingga pembuangan sampah melalui ekspor menjadi jalan utama yang mereka ambil. Sebagaimana Inggris yang lebih memilih untuk mengirim sebagian besar sampahnya ke Swedia karena lebih mengurangi biaya dibandingkan membuang sampah di tempat pembuangan sampah negaranya. Hal tersebut dipicu oleh sistem pengelolaan sampah di Inggris yang tidak efektif. Selain itu sejak tahun 1996 Inggris

menerapkan pajak yang mahal terkait pembuangan sampah di negaranya, yang diatur dalam undang-undang The Landfill Tax of 1996 (Sheffield, 2016).

Jika Inggris dan sebagian besar negara di Eropa maupun di belahan benua lainnya masih berupaya keras untuk mengurangi pembuangan sampah di *landfills*, Swedia justru telah selangkah lebih maju dalam kaitannya dengan upaya pencapaian *zero waste* untuk pembuangan ke *landfills*. Mulai tahun 2011 diperkirakan jumlah sampah Swedia yang dibuang ke *landfills* hanya berkisar 1% dari keseluruhan sampah yang dihasilkan. Namun demikian di tahun selanjutnya Swedia kemudian justru mulai melakukan impor sampah dari negara-negara Eropa di sekitarnya. Setiap hari terdapat sekitar 300 truk yang mengangkut sampah ke daerah pinggiran kota Göteborg, dekat dengan Pantai Barat Swedia. Sampah-sampah tersebut merupakan sampah dari luar negeri termasuk sampah dari kota-kota yang ada di Swedia.

Data yang berasal dari *Avfall Sverige*⁶ menunjukkan bahwa sejak tahun 2004 Swedia mulai melakukan impor sampah berturut-turut dengan rata-rata sebanyak 200.000 ton dari tahun ke tahun. Bahkan sampah yang sebagian besar oleh negara-negara lain berusaha untuk dibuang, Swedia semakin intens mengimpornya dan meningkatkan jumlah pasokan sampah dari mereka yang melonjak menjadi 813.000 ton pada tahun 2011. Kemudian pada tahun berikutnya jumlah sampah yang diimpor terus mengalami peningkatan hingga mencapai hampir 100 persen, yaitu pada tahun 2015 sekitar 1,3 juta ton sampah. *Avfall Sverige* juga memperkirakan bahwa impor sampah akan meningkat hingga 2,3 juta ton pada tahun 2020 mendatang. CEO dari Asosiasi Manajemen Sampah Swedia, Weine Wiqvist bahkan mengatakan telah mendapatkan banyak email dari luar negeri yang menawarkan sampah kepadanya. Sampah-sampah yang telah diimpor oleh Swedia sebagian besar berasal dari negara di kawasan terdekatnya yaitu Norwegia dan sisanya berasal dari Inggris dan Irlandia (Braw, 2015). Selain negara-negara tersebut, Swedia juga menargetkan Bulgaria, Rumania dan Italia

⁶ *Avfall Sverige* merupakan Asosiasi pengelolaan sampah dan daur ulang dari Swedia, yang beranggotakan 400 orang dari sektor pengelolaan dan daur ulang sampah publik dan swasta. *Avfall Sverige*. 2017. *Avfall Sverige – The Swedish Waste Management Association*. Diakses dari <https://www.avfallsverige.se/in-english/> pada 9 Desember 2017

sebagai eksportirnya di masa depan karena menurut penasehat senior dari Agensi Perlindungan Lingkungan Swedia menyatakan bahwa negara-negara yang ditargetkan tersebut sangat bergantung dengan pembuangan sampah ke *landfills* dan disisi lain sistem pengelolaan yang mereka terapkan tidak efisien dan tidak ramah lingkungan (Jones, 2012).

Jika sejak awal tahun 1990-an Swedia berupaya keras untuk mengurangi jumlah pembuangan sampah di keseluruhan *landfills* di negaranya untuk mencapai target *zero waste*, seharusnya dengan pencapaian penurunan volume sampah hingga tersisa 1% pada tahun 2011, usaha Swedia tinggal satu langkah lagi untuk mencapai target tersebut. Namun pada kenyataannya Swedia justru melakukan impor sampah dari negara lain yang jumlahnya terus meningkat hampir setiap tahunnya. Terlebih lagi selama ini negara Skandinavia tersebut menjadi pioner dunia yang memberikan contoh pembangunan negaranya yang berbasis pada keramahan lingkungan. Pemerintah Swedia mulai banyak memberikan perhatian terhadap isu lingkungan sejak Partai Hijau berhasil mendapatkan kursi di pemerintahan dan mencapai popularitasnya pada tahun 1988 (BBC News, 2016).

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis memandang bahwa anomali yang terjadi dalam fenomena tersebut sangat mungkin untuk dianalisis secara ilmiah. Penulis memberi judul pada karya tulis ilmiah ini sebagai berikut :

“Kebijakan Swedia Untuk Melakukan Impor Sampah”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam penelitian karya ilmiah, ruang lingkup pembahasan menjadi salah satu hal yang penting. Skala bagi area pembahasan masalah sangatlah penting karena bertujuan agar pembahasan tidak keluar dari lingkup penelitian yang telah ditentukan. Penulis akan mendapat kemudahan dalam menganalisa permasalahan secara akurat, sistematis dan mendalam jika permasalahan dibatasi dengan jelas. Dengan demikian hasil penelitian akan menjadi produk yang berkualitas untuk

dibaca. Ruang lingkup pembahasan terbagi menjadi dua bagian, yakni batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Penulis membatasi permasalahan yang dikaji dalam karya ilmiah ini pada kondisi dan isu yang menjadi alasan Swedia menerapkan intensifikasi kegiatan impor sampah yang dilakukan terhadap negara-negara tetangganya. Data-data pendukung jawaban akan difokuskan pada kebijakan domestik Swedia terkait permasalahan tersebut.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu sangat penting untuk menentukan rentang waktu dari permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Penulis memilih batasan waktu pada tahun 2011 sampai awal tahun 2018 untuk karya tulis ilmiah ini. Tahun 2011 menjadi awal dari peningkatan impor sampah yang semakin intens dilakukan oleh Swedia sedangkan awal tahun 2018 menjadi batasan akhir karena merupakan awal dari penelitian ini dimulai.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian terpenting dalam penulisan karya ilmiah. Karena arah dan tujuan dari penelitian ditentukan oleh rumusan masalah. Sesuai dengan tema yang diambil oleh penulis, untuk mempermudah dalam menentukan, menyusun, serta memaparkan jawaban atas pertanyaan yang muncul dari permasalahan yang dikaji penulis. Dari proses tersebut maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

“Mengapa Swedia menerapkan impor sampah secara intensif?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam suatu karya ilmiah harus sejalan dengan rumusan permasalahan yang diambil oleh penulis. Oleh karena itu, tujuan penelitian dalam

karya ilmiah ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara ilmiah alasan Swedia memutuskan untuk menerapkan intensifikasi impor sampah.

1.5 Kerangka Konseptual

Dalam karya ilmiah kerangka dasar pemikiran diperlukan untuk mempermudah proses pembahasan penelitian. Kerangka dasar pemikiran berfungsi sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Pikiran awal peneliti bermula dari kerangka dasar pemikiran, melalui beberapa konsep atau teori yang menjadi alat untuk menganalisis fenomena atau objek yang diteliti. Sebagaimana Charles A. Mc Clelland mendefinisikan teori sebagai :

“... kerangka dasar untuk mengatur fakta-fakta, teori merupakan pedoman untuk melaksanakan kegiatan, teori merupakan seperangkat pernyataan yang mengenai keadaan yang diharapkan, teori merupakan pemikiran spekulatif, bebas dari ikatan dunia nyata, teori merupakan abstraksi”(Mc Clelland, 1986: 10)

Sedangkan Mohtar Masoed mendefinisikan konsep dalam karya ilmiah sebagai berikut :

“... konsep merupakan sebuah simbol dalam bahasa atau kata abstrak yang melambangkan dan menyederhanakan suatu gagasan yang memiliki pengertian kompleks, digunakan secara komprehensif sehingga dapat dipahami secara sederhana”(Mas'oed, 1990: 44)

Berdasarkan definisi diatas, maka dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan *konsep Energy Security* dan *Green Politics Theory*. Penulis menggunakan teori dan konsep tersebut sebagai alat analisis dalam membedah dan memahami alasan Swedia menerapkan kebijakan impor sampah yang dilakukannya secara intens pada tahun 2011.

1.5.1 Konsep Energy Security

Keamanan secara sederhana mengacu pada perlindungan atau keselamatan untuk suatu entitas. Oleh karena itu, ketidakhadiran dari ancaman terhadap nilai-nilai yang dibawa oleh entitas tersebut merupakan tujuan utama yang ingin dicapai. Dalam perspektif tradisional yang diidentikkan dengan istilah Perang Dingin, keamanan mengarah pada penggunaan *“force”* yang secara khusus

didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara dan sebagian besar ancaman yang dihadapi oleh negara tersebut serupa dengan ancaman militer. Hal tersebut merupakan bagian dari tradisi Realist yang memahami bahwa negara dalam upaya bertahan dari sistem anarki internasional, mereka memaksimalkan kapabilitas militernya sebagai satu-satunya metode untuk mencapai keamanan dalam negaranya. karena sumber dari ketidakamanannya cenderung berakar dari konflik antar negara. Definisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik Perang Dingin yang memiliki kondisi politik dan permusuhan ekonomi yang intens antara dua negara *superpower* yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Namun kemudian, para akademisi memperdebatkan tentang siapa atau apa yang seharusnya menjadi “*referent object*” karena pendekatan tradisional yang mengarah pada militer yang *state-centric* dipandang sebagai pemahaman keamanan yang tidak cukup dan terlalu sempit jika digunakan untuk menjelaskan berbagai kasus ketidakamanan yang diakibatkan oleh ancaman yang berasal dari wilayah domestik suatu negara itu sendiri.

Pasca Perang Dingin konsep keamanan mengalami pergeseran fokus dari yang semula perhatian utama ditujukan pada persoalan keamanan militer suatu negara menjadi lebih luas lagi ke hal-hal lain yang bersifat non-militer. Konsep keamanan kontemporer yang paling berpengaruh terutama sekali yang diusulkan oleh Barry Buzan dan Ole Wæver serta beberapa pemikir lainnya yang dikenal sebagai kelompok pemikir *Copenhagen School*. Gagasan yang dikemukakan oleh *Copenhagen School* tentang studi keamanan dikembangkan dari perspektif konstruktivis berupa gagasan sekuritisasi yang didasarkan pada hasil penelitian salah satu pemikirnya yaitu Barry Buzan pada bukunya tahun 1983 yang berjudul *People, States and Fear*. Ia berargumen bahwa keamanan militer hanya merupakan satu segi dari keamanan dan pendekatan tradisional tidak cukup untuk bisa menjelaskan berbagai ancaman yang lebih luas yang dihadapi oleh manusia. Elemen utama yang ada dalam analisisnya adalah pandangan bahwa masyarakat, individu, dan negara mampu untuk mengkonstruksi atau melakukan “sekuritisasi” terhadap berbagai ancaman (Hough, et. al., 2015)

Dalam hal teori sekuritisasi, yang membedakan konsep keamanan dalam pandangan Copenhagen School dengan pandangan tradisional adalah fokus terhadap keamanan sebagai “wacana”. Sebagaimana Wæver berargumen bahwa keamanan adalah semacam “tindakan diskursif” sebagai “*speech act*”, dimana masalah keamanan diberi label sebagai sesuatu yang “penting” dan “mendesak”, yang melegitimasi penggunaan tindakan khusus di luar proses politik biasa untuk menghadapinya. Sehingga dalam hal ini, pemahaman intersubjektif dibangun dalam komunitas politik untuk memperlakukan sesuatu sebagai sebuah ancaman eksistensial terhadap *referent object* yang dinilai dan untuk memperbolehkan tindakan mendesak untuk menghadapi ancaman tersebut.

Masalah keamanan energi menjadi salah satu masalah keamanan kontemporer yang sangat vital. Secara bertahap persoalan energi telah menjadi pertimbangan keamanan dan dianggap sebagai ancaman eksistensial terhadap kedaulatan negara. Brosso mengatakan bahwa energi itu sendiri bukanlah suatu masalah, energi berdampak pada sektor lain. Saat ini energi tidak hanya dianggap sebagai tantangan utama dari sudut pandang ekonomi tetapi juga implikasinya terhadap lingkungan dan iklim. Persaingan yang meningkat karena sumber daya yang langka dan kenaikan harga atau harga yang tidak konsisten menimbulkan kekhawatiran yang serius bagi keamanan energi (Özcan, 2013).

Energy Security didefinisikan oleh International Energy Agency (IEA) sebagai suatu kondisi dimana ketersediaan energi tidak terputus dan tanpa gangguan dengan harga yang terjangkau. Keamanan energi memiliki banyak aspek yaitu keamanan energi jangka panjang terutama berkaitan dengan investasi yang tepat waktu untuk memasok energi sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan lingkungan. Keamanan energi jangka pendek memberikan fokus terhadap kapabilitas sistem energi untuk segera memberikan tindakan terhadap perubahan mendadak dalam keseimbangan antara permintaan dan penawaran (IEA, 2017).

Selain definisi yang diberikan oleh IEA, terdapat kurang lebih 45 penjelasan dari definisi dan beberapa pandangan berbeda yang muncul dari politisi dan pakarnya terkait keamanan energi. Namun, terdapat beberapa indikator yang pada

dasarnya terkandung dalam definisi-definisi tersebut yang diringkas dan dibedakan dalam 5 S dan 4 A (Savacool, 2011: 3) .

Berikut ini komponen-komponen yang terdapat dalam 5 S yang dikonsepsikan oleh Benjamin K. Savacool :

- *Supply*, yakni memiliki sumber daya seperti bahan bakar fosil, energi alternatif dan energi terbarukan. Ketersediaan pasokan dari energi merupakan hal yang sangat krusial bagi suatu negara karena energi merupakan penyokong dari berjalannya pertumbuhan ekonomi.
- *Sufficiency*, jumlah dari sumber daya-sumber daya tersebut cukup memadai. seberapa banyak energi yang diproduksi oleh negara dan pembagiannya terhadap konsumsi masyarakat, keduanya harus seimbang, sehingga menghindari kelangkaan energi dalam negaranya.
- *Surety*, yakni memiliki akses terhadap sumber-sumber tersebut. Akses terhadap sumber-sumber energi seringkali berhubungan dengan geopolitik. Posisi strategis suatu wilayah menentukan kemudahan akses energi. Negara yang tidak kaya akan sumber daya alam akan mengalami kesulitan dalam hal ini, sehingga mendorong mereka bergantung dengan negara lain karena perbedaan ruang konsumsi dan produksi. Oleh sebab itu diperlukan energi alternatif untuk menghindari ketergantungan yang akan membahayakan masa depan kebutuhannya.
- *Survivability*, sumber energinya bersifat tangguh dan tahan lama terhadap gangguan dan kerusakan yang mungkin dihadapi. Sehingga dalam keadaan ketika suatu negara tidak memiliki energi yang memadai akibat gangguan tertentu, maka suatu negara harus pandai menetapkan prioritas kebutuhan energinya.
- *Sustainability*, berkaitan dengan penggunaan sumber energi yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. Sehingga bisa mencapai tujuan penggunaan dalam jangka panjang dan berkesinambungan. Sehingga tindakan generasi dalam suatu negaranya tidak mengancam kondisi generasi selanjutnya dalam mengakses sumber energi yang disediakan lingkungan mereka.

4 A merupakan skema klasifikasi yang diusulkan oleh Asia Pacific Energy Research Centre, yang terdiri dari :

- *Availability*, mengacu pada kemampuan konsumen dan pengguna untuk mengamankan energi yang mereka butuhkan. Berkaitan dengan kemandirian yang relatif dan diversifikasi bahan bakar energi dan jasa, Memastikan tersedianya pasokan yang cukup dan tidak terputus, serta meminimalkan ketergantungan impor. Elemen ini terutama berkaitan dengan keberadaan geologi yang menentukan seberapa banyak jumlah sumber daya yang bisa diproduksi.
- *Affordability*, istilah ini cukup abstrak untuk digunakan terutama dalam mengkalkulasi tingkat keterjangkauan bagi suatu negara terhadap sumber daya energi. Namun, elemen ini tidak hanya diartikan sebagai usaha penurunan harga sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan energi tetapi juga mencakup kestabilan harga dan akses yang adil terhadap layanan energi.
- *Accessibility*, upaya untuk mendapatkan akses terhadap sumber energi seringkali berimplikasi pada aspek geopolitik, karena adanya perbedaan spasial antara konsumsi dan produksi sumber daya. Akses terhadap sumber daya dipengaruhi alasan teknis, geografis, politis, ekonomis ataupun lingkungan. Selain itu, nilai fungsi dari sumber daya energi juga bisa menjadi pengaruh dari keamanan aksesnya.
- *Acceptability*, menekankan pada kebutuhan untuk mengatasi serangkaian konsekuensi dari penipisan fisik lingkungan karena basis yang telah diberikan untuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini erat kaitannya dengan tingkat penerimaan lingkungan terhadap sumber energi yang digunakan. Permasalahan utama yang sering diperhatikan adalah tingkat emisi terhadap lingkungan dan potensi bahaya lainnya.

Dengan demikian, arti dari keamanan energi dari konsepsi diatas mengacu pada kemampuan suatu perekonomian untuk menjamin tersedianya pasokan sumber daya energi yang berkelanjutan dan tepat waktu. Oleh karena itu, keamanan pasokan energi dipengaruhi oleh faktor-faktor ketersediaan dari (energi

secara fisik) dan aksesibilitasnya (yang berkaitan dengan geopolitik), keterjangkauan (yang berkaitan dengan harga dan biaya infrastruktur yang dibutuhkan) dan penerimaan atas perubahan yang terjadi pada lingkungan (Labandeira & Manzano, 2012: 8).

Penulis memilih untuk menggunakan konsep *energy security* dari APERC yang berisikan skema 4A dalam kaitannya untuk menganalisis urgensi Swedia meningkatkan kegiatan impor sampah yang dilakukannya. Hal tersebut bertujuan untuk mengkalkulasi tingkat keamanan energi dari sampah bagi keseimbangan pemenuhan kebutuhan energi Swedia. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas terkait komponen-komponen pendukung stabilitas keamanan energi, rendahnya kerentanan dari sistem energi yang vital merupakan arti dari Keamanan energi. Keamanan energi merupakan satu paket keamanan yang artinya di dalamnya terdapat beberapa sistem tertentu, misalnya keamanan energi listrik, keamanan energi untuk transportasi dan lain sebagainya (Cherp & Jewell 2013: 150). Keamanan energi dianggap sebagai sesuatu yang krusial karena energi merupakan komponen penting yang menyokong berjalannya pertumbuhan ekonomi negara terutama pada era industri saat ini. Selain itu penggunaan energi konvensional seringkali berpotensi membahayakan planet dan generasi di masa depan. Oleh sebab itu, pengamanan energi dipandang sebagai komponen kunci keamanan nasional untuk mengarahkan pengambilan kebijakan yang benar (Yergin, 2006: 78).

1.5.2 Green Politics Theory

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dibuktikan dalam beberapa dekade terakhir telah menunjukkan implikasinya terhadap lingkungan alam. Hal tersebut telah menyebabkan timbulnya pemikiran baru dalam ruang lingkup kajian Ilmu Hubungan Internasional tentang pandangan terhadap alam yang dikenal dengan nama *ecocentrism*. Topik terkait politik lingkungan menjadi bagian dari tradisi teori kritis karena etos kritis yang telah menjadi bagian dari cara mengkajinya. Hal tersebut sebagaimana hasil kerja Frankfurt School terkait persoalan lingkungan sebagai konsekuensi dari modernisasi, yang telah menjadi pacuan utama dalam membangunkan pemikiran kritisnya.

Ide utama dari *ecocentrisme* adalah pandangan terkait kepentingan ekosistem atau keseluruhan ekologi merupakan kepentingan moral secara langsung, bahwa kesejahteraan dari sistemnya secara langsung menjadi sesuatu yang harus diperhatikan, dalam artian kepentingan untuknya terbebas dari kepentingan manusia. Pandangan tersebut merupakan respon kritis terhadap pandangan *anthropocentrism* yang sebelumnya mendominasi politik global, dengan pandangannya yang bertentangan yaitu kepentingan moral yang hanya menjadi pusat perhatian hanyalah kepentingan manusia atau kepentingan terhadap hal-hal lain yang mempengaruhi kepentingan manusia. Namun demikian, *ecocentrisme* tidak bermaksud memberikan penolakan secara keseluruhan terhadap pandangan *anthropocentrism*, karena manusia merupakan bagian dari organisme individu yang hidup (*biocentrism*) yang menjadi bagian dari perhatian pandangan ini. Salah satu pemikiran politik terkait lingkungan yang paling baru yang sangat berkontribusi dalam menangani isu-isu kontemporer yaitu *Green Politics Theory* (McShane, 2014).

Green Politics Theory merupakan pemikiran politik yang memberikan fokus perhatian pada permasalahan hubungan antara manusia dan lingkungan alamnya. Dasar pemikirannya adalah mempertanyakan secara filosofis tentang status moral semua makhluk hidup yang ada di bumi, ‘bagaimanakah kehidupan yang baik itu?’, demikian juga kaitannya dengan etika dan regulasi politik dari inovasi teknologi. Teori ini juga dimaksudkan untuk menangani isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan implikasi ekonomi dan politik seperti *perubahan iklim*, *peak oil*⁷, *overconsumptions*, kompetisi dan konflik akibat sumber daya, dan tingkat ketidaksetaraan nasional dan global yang semakin meningkat. (Barry, 2014: 1).

Perkembangan teori ini diambil dari fakta bahwa manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alam, sehingga akan selalu memiliki implikasi bagi perilaku politiknya terhadap alam. Oleh sebab itu, manusia tidak hanya dipandang sebagai individu rasional dan sosial tetapi juga sebagai makhluk alam

⁷*Peak oil* merupakan suatu kondisi yang menunjukkan tingkat produksi minyak mentah global mencapai titik puncak maksimum yang kemudian menyebabkan penurunan secara bertahap dari produksi minyak selanjutnya. Conserve Energy Future. 2019. *What is Peak Oil?*. Diakses dari <https://www.conserve-energy-future.com/what-is-peak-oil.php> pada 14 Januari 2018

dan binatang politik. Teori ini berargumen bahwa struktur ekonomi, sosial dan politik yang sudah ada memerlukan perhatian dan perombakan untuk perubahan yang lebih baik. Karena hal itu yang menjadi penyebab dasar terjadinya krisis lingkungan.

Terdapat tiga prinsip utama yang menjadi konsepsi dan mewakili penjelasan utama dari makna *Green politics theory* yang dibawakan oleh John Barry, antara lain :

1. *Distribusi keadilan (antar generasi)*, untuk mencapai *Sustainable Development*, pembangunan suatu negara harus beriringan dengan pelestarian lingkungan. Sehingga generasi yang akan datang masih memiliki kesempatan yang sama dengan generasi sekarang terkait akses sumber daya alam.
2. *Komitmen terhadap proses demokratisasi*, berkaitan dengan gagasan masyarakat umum terkait perlunya untuk dilakukan desentralisasi kekuasaan. Dalam hal ini semua kalangan masyarakat perlu untuk dilibatkan partisipasinya dalam pembuatan kebijakan sehingga mampu menghasilkan praktek yang berkelanjutan dalam keterbatasan planet bumi.
3. *Usaha untuk mencapai keberlangsungan ekologi*, untuk mendapatkan keseimbangan antara pembangunan dan ekologi yang berkesinambungan, maka diperlukan perbaikan terhadap struktur dari sistem yang ada yang selama ini menjadi penyebab dari krisis ekologis (Burchill & Linklater, 1996: 359).

Dari tiga konsepsi tersebut, penulis melihat bahwa Swedia berupaya memasukkan ketiga elemen kunci tersebut dalam sistem pembangunan negaranya. Usaha Swedia dalam mencapai keberlangsungan ekologi adalah suatu ongkos untuk mendapatkan demokrasi dan keadilan sosial bagi masyarakatnya, lebih jauh lagi antar generasinya.

Green Politics Theory pada dasarnya bermula dari gerakan yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Gerakan lingkungan tersebut

terbagi menjadi dua yakni *gerakan lingkungan radikal* dan *gerakan lingkungan reformis* :

1. *Gerakan lingkungan radikal*, sifatnya proaktif dan melihat persoalan lingkungan sampai pada akarnya. Gerakan ini berpandangan bahwa perlu untuk dilakukan perubahan sosial yang fundamental, dengan melakukan eliminasi atau agenda rekonstruksi kapitalisme. Gerakan ini bersifat politis-struktural yang bisa digambarkan seperti perlawanan akar rumput.
2. *Gerakan lingkungan reformis*, kelompok ini mencoba untuk memperbaiki sistem kapitalisme menjadi lebih baik untuk menghadapi permasalahan lingkungan yang terjadi. Gerakannya diadopsi dari paham *teknosentrisme*, yang beranggapan bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan pengaturan ekosistem yang rasional adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan persoalan lingkungan. Berbeda dengan gerakan radikal yang menentang modernisasi, gerakan ini masih mendukung cara-cara modern dan kemajuan teknologi dengan memanfaatkannya untuk mengatasi krisis ekologi yang terjadi. Dalam gerakan ini, keterlibatan pemerintah dalam pengaturan perekonomian atau pasar di masyarakat adalah sebuah solusi yang diharapkan dan didukung oleh mereka. Mereka berpendapat bahwa kepemilikan pribadi terhadap lingkungan dan peningkatannya terkait fenomena tersebut akan mengganggu kondisi objektif lingkungan. Oleh sebab itu, biasanya kelompok ini merekomendasikan solusi seperti peningkatan pajak lingkungan, insentif, regulasi perusahaan-perusahaan dan kepemilikan swasta. Sehingga dalam hal ini keterlibatan pemerintah dipertanyakan (Apriwan, 2011: 42).

Berdasarkan dari pembagian gerakan tersebut, penulis menganalisis bahwa kebijakan impor sampah Swedia merupakan bagian dari pendekatan atas cara penyelesaian lingkungan yang berbentuk *gerakan reformis*. Hal tersebut karena Swedia berupaya menggunakan cara yang mendekati paham *teknosentrisme* yaitu dengan menggunakan teknologi modern dalam menyelesaikan persoalan lingkungan.

Politik hijau yang sering dikenal dengan gerakan ekologi ini sendiri juga memiliki 10 nilai kunci yang menjadi dasar dan tujuan gerakan serta artikulasi

kebijakan publik. Nilai-nilai tersebut diadopsi secara langsung oleh berbagai partai hijau di dunia termasuk partai hijau dari negara-negara di Benua Eropa dan Amerika (Green Party of Washington, 2017) :

1. *Respect for Diversity*, nilai ini dimaksudkan untuk menghargai perbedaan dalam keaneragaman hayati bumi. Kaum ekologis percaya bahwa keaneragaman budaya, ras, etnis, perbedaan jenis kelamin, agama dan spiritual masyarakatnya mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya membentuk hubungan dengan saling menghargai satu sama lain dalam spektrum kehidupan manusia.
2. *Gender Equity*, nilai ini berkomitmen untuk menegakkan kesetaraan gender dalam keseluruhan aspek masyarakat. Kaum ekologis menyadari bahwa selama ini masyarakat telah mewarisi sistem sosial yang berorientasi pada dominasi patriarki baik dalam bidang politik maupun ekonomi. oleh sebab itu, nilai ini berupaya untuk menggeser etika budaya dominasi dan kontrol dengan cara menekankan penghormatan terhadap perbedaan pendapat dan jenis kelamin. Selain itu tanggung jawab masing-masing individu dan kejujuran juga harus dikembangkan, karena penentuan terhadap kebijakan maupun tindakan yang akan kita ambil sama pentingnya dengan pencapaian yang kita inginkan.
3. *Social and Racial Justice*, kaum ekologis menekankan bahwa kesempatan yang sama atas sumber daya alam merupakan hak bagi setiap individu. Dengan demikian, penindasan yang berorientasi pada ras, kelas, jenis kelamin dan usia, kewarganegaraan, agama maupun kemampuan fisik merupakan sesuatu yang harus ditentang sehingga keadilan sosial didapatkan oleh setiap individu.
4. *Grassroots Democracy*, dalam hal ini partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan akan memperluas proses demokrasi. Kaum ekologis percaya bahwa sistem pemilihan memerlukan reformasi agar masyarakat mendapatkan akses yang penuh dan lebih adil. Oleh karena itu penting untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam semua tingkat pemerintahan.

5. *Non-Violence*, nilai ini berupaya untuk mewujudkan suatu perdamaian yang abadi bagi masyarakat dengan mengupayakan berbagai penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Oleh karena itu, kaum ekologis berfokus pada demiliterisasi dan penentangan terhadap senjata pemusnah massal.
6. *Ecological Wisdom*, nilai ini menekankan pentingnya masyarakat yang berkelanjutan dengan pengertian bahwa mereka adalah bagian dari alam yang tidak terpisahkan dan karenanya mereka harus menjaga keseimbangan dari lingkungan hidup sesuai dengan batas-batas ekologis dan sumber daya yang ada di bumi ini. Tujuannya adalah agar generasi mendatang akan merasakan kesempatan yang sama untuk menikmati sumber daya alam yang lestari oleh tindakan yang diambil oleh generasi saat ini. Salah satu yang paling vital saat ini adalah kebutuhan energi, dalam hal ini masyarakat harus beralih pada ekonomi yang menghemat energi.
7. *Decentralization*, pada nilai ini kelompok ekologis mengharapkan restrukturisasi dari sistem sosial, politik dan ekonomi yang lebih demokratis dan tidak birokratis. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus sejauh mungkin berada di tingkat individu dan lokal dan memastikan bahwa hak-hak sipil terlindungi.
8. *Community-Based Economics*, kelompok ekologis menekankan dalam nilai ini bahwa pencarian ekonomi harus berorientasi pada kelestarian ekologi global sehingga lebih adil dan stabil. Dalam hal ini penggunaan teknologi dengan cara yang manusiawi dan bertanggungjawab terhadap implikasinya pada masyarakat.
9. *Personal and Global Responsibility*, nilai ini menekankan pada setiap individu untuk memiliki tanggungjawab pribadi masing-masing sementara dalam membangun tanggungjawab untuk dirinya sendiri juga maka pada saat yang bersamaan akan mendorong perdamaian, keadilan ekonomi dan kesehatan dari planetnya. Oleh karena itu, kelompok hijau ini berusaha untuk bergabung dengan organisasi di seluruh dunia untuk mewujudkan hal tersebut.

10. *Future Focus*, setiap kebijakan yang diambil harus disematkan tujuan jangka panjangnya. Oleh karena itu pengembangan perekonomian yang fokus pada masa depan yang berkelanjutan (Green Party US, 2016).

Peran dari partai politik dalam gerakan yang diartikulasikan dari politik hijau merupakan faktor utama yang mendukung berkembangnya gerakan yang bertujuan untuk menyelamatkan keseimbangan ekologi tersebut. Bukti nyatanya adalah bahwa pada dekade sekitar tahun 1970-an dan 1980-an ketika gerakan yang dilakukan masih berupa aksi jalanan dan belum terlembagakan, hal tersebut tidak memberikan pengaruh sama sekali terhadap pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Namun demikian, setelah terlembagakannya gerakan politik tersebut kedalam partai politik, fenomena gerakan menjadi berkembang dan mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Contoh nyata yang terjadi adalah perkembangan partai-partai hijau di Benua Eropa dan negara-negara Skandinavia termasuk Swedia dan di Benua Amerika. Tidak hanya di level nasional dan regional, gerakan tersebut juga berkembang hingga level global. Hal ini dibuktikan dengan terciptanya sub-organisasi global yakni PBB yang menangani isu lingkungan global seperti *United Nations Environment Programme (UNEP)*, serta organisasi-organisasi lain seperti *OECD* yang juga memasukkan isu lingkungan dalam agendanya. Selain itu banyaknya partai-partai hijau yang masuk ke dalam parlement merupakan kekuatan utama dari politik hijau, karena mereka akan cukup mudah dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah di negaranya (Apriwan, 2011: 38).

Dalam kaitannya dengan kegiatan Swedia menerapkan impor sampah, gerakan-gerakan politik hijau diartikulasikan melalui implementasi kebijakan-kebijakan lingkungan. Perluasan teknologi *Waste-to-energy* yang dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menggeser penggunaan energi fosil yang sifatnya tidak ramah lingkungan dengan teknologi yang lebih menghasilkan emisi yang rendah. Skripsi ini berargumen bahwa hal tersebut merupakan bagian dari gerakan politik hijau yang bersifat reformis sebagai upaya restrukturisasi dari sistem sosial, politik dan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Kegiatan impor sampah yang dijalankan Swedia akan dianalisis melalui peran-peran kelompok hijau dalam kebijakan lingkungan yang dibawa oleh mereka.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama bertujuan untuk memaparkan jawaban sementara atas permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam karya tulis ilmiah. Berdasarkan konsep dan teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam skripsi ini, maka dalam karya ilmiah ini penulis berargumentasi bahwa kebijakan impor sampah yang diterapkan oleh Swedia merupakan suatu bentuk upaya pemenuhan kebutuhan energi dalam negerinya dalam mode *clean energy*, hal tersebut ditujukan untuk stabilitas keamanan energi domestiknya. Kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh partai hijau di dalam negaranya yang telah menaikkan isu perubahan iklim di Swedia. Keduanya saling berkorelasi karena perkembangan industrialisasi yang pesat telah mendorong kenaikan tingkat konsumsi energi dan produksi sampah yang juga sejalan kenaikannya.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan teknik atau cara peneliti untuk memperoleh dan membuktikan kebenaran serta pengetahuan yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara sistematis. Metode yang dilakukan dimulai dengan proses pengumpulan data, analisa mengenai data tersebut, dan menyimpulkannya sehingga didapatkan kebenaran dan pembuktian tentang pengetahuan. Dengan menggunakan metode penelitian penulis akan mudah dalam menganalisis variabel yang ada terkait isu yang sedang dibahas. Metode penelitian dibagi menjadi 2 bagian, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian untuk karya ilmiah ini penulis menggunakan teknik teknik *studi literatur* atau *secondary data* dalam mengumpulkan data-data penelitian. Dalam metode studi literatur penulis tidak diharuskan untuk melakukan observasi langsung dari lapangan mengenai permasalahan yang sedang diangkat, melainkan melalui buku-buku dan penelitian terdahulu yang dianggap masih relevan baik dalam hal lingkup pembahasan maupun

lingkup batasan waktu dalam penelitian. Studi literatur dalam penelitian ini dilaksanakan di :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
2. Ruang Baca FISIP Universitas Jember

Literatur yang didapat penulis berasal dari :

1. Buku
2. Jurnal Ilmiah Nasional & Internasional
3. Skripsi
4. Laporan
5. Internet

1.7.2 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan karya ilmiah ini dimulai dengan pengumpulan berbagai materi yang dibahas, kemudian disajikan dan diverifikasi. Analisis yang digunakan dalam karya ilmiah ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yang berupaya untuk menjelaskan suatu fenomena dengan teori yang digunakan sebagai alat analisisnya dengan cara mengkualifikasikan data-data ilmiah yang saling berkaitan sehingga bisa menemukan kesimpulan yang ilmiah dan objektif. Kemudian data yang telah terkumpul tersebut dianalisis sehingga penulis bisa mengetahui jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan dalam rumusan masalah yang juga merupakan tujuan awal dari penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terbagi menjadi 5 bab, diantaranya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan penulis menyajikan latar belakang dari permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ilmiah ini. Kemudian dalam bab ini penulis juga akan memaparkan rincian terkait penelitian yang dilakukan dalam proses pembuatan karya ilmiah ini, yang meliputi ruang lingkup pembahasan,

rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Eksistensi Kelompok Environmentalist dalam Politik Pemerintahan Swedia

Dalam Bab II penulis menganalisa dan memaparkan kondisi politik negara Swedia dan seberapa dominan peran dan pengaruh kelompok environmentalist dalam pemerintahan negara Swedia serta keterkaitannya dengan kebijakan impor sampah di negaranya.

Bab III Isu Sampah dan Kebutuhan Energi Swedia

Dalam Bab III ini penulis membahas mengenai dua bagian penting dari penelitian yang saling berkorelasi, yaitu tentang persoalan sampah domestik di Swedia dan bagaimana kondisi ketersediaan energi di Swedia dan keseimbangan dengan kebutuhan energinya.

Bab IV Analisis Urgensi Penerapan Impor Sampah bagi Swedia

Dalam bab IV penulis menjelaskan hasil analisisnya untuk menjawab inti persoalan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah dari karya ilmiah ini. Penulis menyajikan analisisnya terkait alasan Swedia melakukan impor sampah, faktor apa saja yang melatarbelakangi pengambilan keputusan tersebut, apa strategi yang sedang mereka jalankan dan apa yang akan Swedia lakukan dengan sampah-sampah yang mereka impor serta bagaimana *outcome* dari kebijakan tersebut.

Bab V Kesimpulan

Bab ini merupakan penutup dari karya ilmiah ini. Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang akan disajikan dalam karya tulis ini, yakni dengan memberikan pemaparan dari jawaban yang singkat dari pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Penutup dalam karya ilmiah ini berisi tentang jawaban permasalahan yang tertera pada bab-bab sebelumnya dalam bentuk yang lebih sederhana.



BAB 2

EKSISTENSI KELOMPOK ENVIRONMENTALIST DALAM POLITIK PEMERINTAHAN SWEDIA

Dalam mengambil keputusan untuk menentukan suatu kebijakan, negara melalui proses politik yang melibatkan aktor-aktor politik di dalamnya. Suatu kebijakan yang dibentuk merupakan produk dari agenda politik pemerintah yang merupakan outcome dari pilihan-pilihan yang telah dibuat oleh entitas suatu negara untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Kebijakan yang dibuat biasanya dipengaruhi oleh kebijakan sebelumnya dan kondisi pemerintahan suatu negara. Oleh sebab itu dalam kasus Swedia, penulis menganalisis alasan dibentuknya kebijakan tersebut melalui kondisi politik pemerintahan Swedia dan pengaruh kelompok *environmentalist* di dalamnya.

Bab ini diawali dengan penjelasan mengenai gambaran bentuk Pemerintahan Swedia secara umum, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai eksistensi Partai Hijau Swedia atau *Miljöpartiet de Grön* dalam berbagai level pemerintahan khususnya di dalam *Riksdag*⁸. Selanjutnya sebagai penutup sekaligus sebagai inti dari keterkaitan antara bab ini dengan pertanyaan utama dalam karya ilmiah ini, penulis membahas keterlibatan Partai Hijau Swedia dalam perkembangan isu sampah yang ada di Swedia pada sub bab terakhir. Ketiganya menjadi penting untuk dibahas karena memiliki keterkaitan satu sama lain untuk menuntun penulis dalam mencari proses, arah dan tujuan dibentuknya kebijakan impor sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Swedia. Penting untuk membahas mengenai kelompok *environmentalist* karena pada dasarnya isu terkait sampah merupakan bagian dari isu lingkungan.

Berdasarkan definisi sederhana yang dikutip penulis dari Cambridge Dictionary bahwa, “*Environmentalist is a person who interested in or studies the environment and who tries to protect it from being damaged by human*

⁸Riksdag merupakan sebutan bagi parlemen di Swedia. Parlemen di Swedia berbentuk satu kamar (Unikameral). SVERIGES RIKSDAG. 2019. *A guide to the Swedish Parliament*. Diakses dari <https://riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/andra-sprak/guide-sveriges-riksdag-eng-1612.pdf> pada tanggal 14 Januari 2019

activities”(Cambridge University, 2018). Definisi tersebut secara tidak langsung bisa disimpulkan bahwa setiap orang yang tertarik dalam atau mempelajari lingkungan dan yang mencoba untuk melakukan perlindungan terhadapnya dari berbagai kerusakan yang disebabkan oleh manusia, mereka bisa disebut sebagai *environmentalist*. Biasanya mereka yang menjadi *environmentalist* mendapatkan bekal keahlian menjaga lingkungan melalui pelatihan dan edukasi. Setiap kali terjadi bencana yang diakibatkan oleh manusia, kelompok hijau tersebut menjadi yang pertamakali mendapatkan panggilan. Karena mereka yang paling cepat memahami apa yang menjadi ancaman dan dampak yang diakibatkan oleh bencana yang terjadi. Selain itu mereka juga tahu tindakan penyelamatan yang harus segera dilakukan. Oleh sebab itu, sering kali mereka juga disebut sebagai seseorang yang bekerja untuk melindungi planet ini (Orr, 2010: 16).

Pada umumnya *environmentalist* berbentuk kelompok atau organisasi yang terorganisir secara formal, baik sebagai organisasi non-pemerintah dan lebih jauh lagi mereka memasuki ruang pemerintahan dalam bentuk partai. Kelompok *environmentalist* mengalami perkembangan yang pesat di abad ke-20-an, mereka telah merebak di seluruh penjuru dunia khususnya wilayah Eropa dan termasuk di Swedia. Seorang *environmentalist* tidak selalu berlatar belakang dari sarjana ilmu pengetahuan alam, banyak dari mereka juga berasal dari kelas politik, hukum maupun kebijakan publik. Karena merekalah yang bertugas untuk mengkomunikasikan pentingnya proteksi terhadap lingkungan yang biasanya diimplementasikan melalui peraturan pemerintah terkait lingkungan (Orr, 2010). Oleh karena itu, mereka berupaya memasuki ruang pemerintahan dalam bentuk partai hijau untuk mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan yang menguntungkan kepentingannya terkait lingkungan.

Perubahan iklim merupakan persoalan yang menjadi fokus utama dari kelompok *environmentalist*. Oleh karenanya, kelompok hijau ini selalu berupaya mengajukan berbagai *program hijau*⁹ kepada pemerintah. Program-program hijau

⁹Program hijau merupakan program-program yang berkaitan dengan penanganan isu lingkungan, baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun kegiatan ekonomi yang berkontribusi dalam usaha pengurangan emisi GRK. OECD. 2013. *Green Growth in Stockholm, Sweden*. Diakses dari <https://international.stockholm.se/globalassets/ovriga-bilder-och-filer/green-growth-in-stockholm.pdf> pada tanggal 14 Januari 2019

tersebut biasanya ditujukan untuk mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca, yang merupakan penyebab utama dari perubahan iklim. Dalam hal ini, kebijakan Swedia dalam menerapkan impor sampah bisa dikatakan merupakan salah satu outcome dari bentuk program hijau yang dihasilkan dari proses *lobbying*¹⁰ yang dilakukan oleh kelompok *environmentalist* dalam Pemerintahan Swedia. Oleh sebab itu, untuk menganalisis proses, arah dan tujuan kebijakan impor sampah Swedia, menjadi penting untuk mengetahui bagaimana jalannya Pemerintahan Swedia selama ini melalui gambaran umum dari bentuk pemerintahan Swedia yang kemudian disambung dengan eksistensi kelompok *environmentalist* di dalamnya pemerintahannya.

2.1 Gambaran Umum Pemerintahan Swedia

Swedia atau yang memiliki nama lain Kingdom of Sweden merupakan salah satu dari negara di Semenanjung Skandinavia yang terletak di belahan utara Benua Eropa. Swedia diapit oleh 2 negara Skandinavia yang lain yaitu Norwegia disebelah Utara dan Barat dan Finlandia di sebelah timur. Terdapat dua pulau juga yang terpisah dari daratan Swedia, terletak di bagian selatan wilayah pesisir Swedia tepatnya di Laut Baltik, yaitu Öland dan Gotland (Hogan, et al., 2006: 9). Populasi Swedia kurang lebih hampir 10 juta dengan Ibu kota Stockholm yang terletak di wilayah bagian selatan Swedia. Swedia memiliki luas wilayah 450.300 km² dengan kepadatan penduduk 21 orang/km², Swedia termasuk negara terluas ketiga di benua Eropa. Dengan wilayah yang begitu luas, namun penduduknya tidak terlalu besar hal itu dikarenakan perbedaan yang dramatis dari wilayahnya mulai dari pegunungan Laplandia yang sangat luas di bagian Utara, banyaknya dataran yang bergelombang, dan bukit-bukit Skåne di bagian selatan. Swedia juga masuk kedalam 10 daftar negara yang berpenghasilan paling tinggi diantara negara-negara anggota OECD, dengan penghasilan sebesar 43.834 USD perkapita. Meskipun masuk di keanggotaan Uni Eropa, Swedia tidak memakai mata uang

¹⁰ Lobbying merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok kepentingan tertentu untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, secara eksplisit mengarah pada upaya untuk mempengaruhi cabang legislatif di luar ruang pemerintahan baik secara tertulis maupun komunikasi secara langsung. NCSL. 2019. *How States Define Lobbying and Lobbyist*. Diakses dari <http://www.ncsl.org/research/ethics/50-state-chart-lobby-definitions.aspx> pada tanggal 14 Januari 2019

Euro. Swedia memakai mata uangnya sendiri yang biasa disebut dengan Krona Swedia (SEK) (Hogan, et al., 2006: 11).

Dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam Pemerintahannya, Swedia memiliki sejarah pemerintahan yang sangat dinamis. Negara yang merupakan bekas dari bagian Kekaisaran Viking ini pertamakali menjadi kerajaan yang mandiri sejak berakhirnya Era Viking tahun 1060. Melalui berbagai tempaan dalam pembentukan negaranya, Swedia melalui beberapa era di bawah kekuasaan raja. Sampai akhirnya memasuki Era Kebebasan dan Liberalisme pada tahun 1719, Swedia memiliki konstitusi baru yang memindahkan kekuasaan dari kerajaan ke Riksdag, Sehingga sejak saat itu posisi kerajaan bersifat seremonial dan hanya memiliki sedikit pengaruh (Hogan, et al., 2006: 54).

Saat ini Pemerintahan Swedia berbentuk monarki konstitusional yang konstitusinya dimulai sejak tahun 1809 dan diamandemen pada tahun 1975 yang telah merubah Riksdag menjadi unikameral. Konstitusi ini didasarkan pada empat undang-undang dasar berikut (Government Offices of Sweden, 2017):

- Instrumen Pemerintah, berisi tentang jaminan pemerintah atas hak warga negaranya dalam memperoleh informasi secara bebas, penyelenggaraan demonstrasi, kebebasan untuk membentuk partai politik dan kebebasan dalam menentukan agama mereka.
- Undang-undang Suksesi, dikhususkan untuk mengatur hak dari anggota-anggota *The House of Barnadotte*¹¹ terkait kenaikan tahta di kerajaan Swedia.
- Undang-undang Kebebasan Pers, mengatur prinsip dari akses publik terhadap dokumen-dokumen resmi untuk menjamin keterbukaan pemerintah dengan masyarakat terhadap akses informasi terkait hasil kerja Riksdag, pemerintah dan agensi masyarakat. Undang-undang ini mengizinkan masyarakat untuk mempelajari berbagai dokumen resmi apapun dan kapanpun mereka mau. Selain itu undang-undang tersebut juga mengatur prinsip dari kebebasan

¹¹The House of Barnadotte merupakan nama dari Kerajaan Swedia yang telah berkuasa sekitar seribu tahun yang mengalami pergantian sebanyak sebelas dinasti. Anggota kerajaan selalu terhubung dengan hukum kerajaan di Eropa. Namun, sejak konstitusi Swedia berganti parlementer, pemerintahan berada di tangan Riksdag. Swedish Institute. 2013. *The Swedish Monarchy*. Diakses dari <https://sweden.se/society/the-swedish-monarchy/> pada 14 Januari 2019

untuk mengkomunikasikan berbagai informasi tersebut. Prinsip tersebut mengizinkan Masyarakat Swedia juga untuk memberikan informasi kepada media yang menurut mereka penting dan layak untuk diberitakan kepada publik. Bahkan penerbitnya tidak diizinkan untuk mengungkap identitas individu yang memberikan sumber informasi tersebut jika individu tersebut ingin dijaga kerahasiaannya.

- Undang-undang Kebebasan Berekspresi, merupakan cerminan dari Undang-undang Kebebasan Pers, yang dibuat untuk merespon pelarangan atas penyensoran, dan untuk mendorong terjaminnya kebebasan mengkomunikasikan informasi dan hak bagi para pemberi informasi yang namanya ingin dirahasiakan.

Konstitusi Swedia menggambarkan cara Pemerintah Swedia dalam menggerakkan pemerintahannya. Hal tersebut mengatur hubungan antara pembuatan keputusan dengan kekuasaan eksekutif dan kebebasan serta hak-hak dari masyarakatnya. Oleh karenanya, warga Swedia sangat bisa mempengaruhi kehidupan politik dalam pemerintahan Swedia melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan melaksanakan pemilihan umum untuk memilih partai yang dipilihnya yang kemudian akan menjadi perwakilan yang menyuarakan hak-hak dan kepentingan mereka di parlemen atau ruang pemerintahan di berbagai level. Selain itu, bergabung secara langsung dengan partai politik dan ikutserta dalam pelaksanaan referendum dan berkomentar atau mengkritik setiap laporan yang disajikan oleh pemerintah merupakan cara lain yang bisa dilakukan.

Dengan pemerintahan yang berbentuk monarki, maka kepala negaranya adalah seorang raja namun dalam hal ini raja di Swedia tidak memiliki kekuasaan politik yang formal. Tanggung jawab raja sifatnya hanya seremonial. Swedia saat ini dikepalai oleh Raja Carl XVI Gustaf yang naik tahtasejak tahun 1973. Sebagai kepala negara, ia mewakili keseluruhan rakyat dalam negerinya, namun tidak berpartisipasi dalam kehidupan perpolitikan di negaranya. Tugas raja juga termasuk memimpin rapat Dewan Penasehat Urusan Luar Negeri. Sedangkan Kepala Pemerintah Swedia adalah Perdana Menteri, yang merupakan penggerak utama kehidupan politik di Swedia. Perdana Menteri Swedia saat ini adalah Stefan

Löfven, yang juga merupakan ketua dari Partai Sosial Demokrat Swedia saat ini. Sebagai Pemimpin Pemerintahan Swedia, ia bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan hasil kerja di dalam pemerintahan. Selain itu, ia bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan kebijakan Uni Eropa Swedia dan manajemen keadaan darurat di pemerintahan.

Pemerintahan Swedia dijalankan oleh parlemen yang bersifat Unikameral (satu kamar) dengan nama *Riksdag*, yang merupakan forum perwakilan utama bagi rakyat Swedia. Tugas dari *Riksdag* adalah membuat keputusan dan pemerintah domestik dari berbagai level yang bertugas menerapkannya. selain itu *Riksdag* juga bertugas untuk menyetujui undang-undang baru atau amandemen undang-undang yang diajukan oleh pemerintah (Government Offices of Sweden, 2017). *Riksdag* juga bertugas untuk menunjuk Perdana Menteri dan Perdana Menteri secara pribadi menunjuk para menteri untuk membentuk kabinet juga membagi tugas kepada para menteri yang ditunjuk, mereka secara bersama-sama bertugas untuk membentuk pemerintahan Swedia. Para menteri biasanya merepresentasikan kekuasaan partai-partai politik yang memiliki kursi di *Riksdag*. Dalam pembukaan resmi *Riksdag* pada setiap bulan September, Perdana Menteri menyampaikan pernyataan terkait Kebijakan Pemerintah.

Anggota *Riksdag* berjumlah 349 orang yang merupakan gabungan dari beberapa perwakilan partai pemenang pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung berdasarkan hak pilih bagi warga Swedia yang berusia 18 tahun ke atas, atau warga yang telah menetap di Swedia. Pemilihan umum tersebut biasanya dilakukan setiap empat tahun sekali yang diselenggarakan pada hari minggu ketiga pada bulan September. Keseluruhan pemilihan menggunakan prinsip *representasi proporsional*¹² untuk memastikan bahwa kursi parlemen terdistribusikan secara adil dan rata diantara partai-partai politik dalam proporsi para pemilih di dalam keseluruhan negaranya. Untuk mendapatkan kursi di *Riksdag*, terdapat sebuah peraturan bagi keseluruhan partai tanpa terkecuali untuk

¹² Sistem pemilu yang mempertimbangkan proporsi jumlah kursi dengan jumlah pemilih di setiap daerah pemilihan. Hal tersebut dimaksudkan agar porsi perolehan suara sebuah partai ditingkat nasional dan porsi dalam kursi parlementer memiliki disparitas yang lebih sedikit. Reynolds, Andrew dkk.2005. *International Institute fo Democracy and Electoral Assistance*. Stockholm : International IDEA).

memperoleh suara minimal sebanyak 4% dalam pemilu. Hal tersebut ditujukan untuk mencegah partai-partai yang terlalu kecil untuk bisa masuk ke parlemen (The Swedish Institute, 2014).

Terdapat 8 partai yang saat ini menjadi perwakilan rakyat Swedia di dalam parlemennya, berikut ini mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil :

- 1) *Socialdemokraterna* atau *the Social Democratic Party*, partai ini pada dasarnya adalah partai buruh dan merupakan partai tertua yang ada di Swedia. Berbagai kebijakan yang diambil oleh partai ini biasanya didasarkan pada kebebasan, persamaan, dan solidaritas dan yang paling diprioritaskan adalah kebijakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan menyediakan pendidikan yang lebih baik lagi bagi masyarakat Swedia. Partai ini merupakan partai yang terbesar di Swedia sampai saat ini dan bekerjasama dengan partai hijau sejak tahun 2014.
- 2) *Moderaterna* atau *The Moderate Party*, pada awalnya dikenal dengan partai nasionalis atau konservatif dan beraliansi dengan partai tengah, liberal dan kristen demokrat, partai ini secara umum mendukung pengurangan pajak dan liberalisasi ekonomi Swedia.
- 3) *Sverigedemokraterna* atau *the Sweden Democrats*, berdiri sebagai partai konservatif sosial yang berkecimpung pada isu imigran dan kebijakannya didasarkan pada identitas nasional.
- 4) *Miljöpartiet de Gröna* atau *the Green Party*, yang memberikan fokus perhatian pada isu lingkungan dan berkoalisi dengan partai sosial demokrat.
- 5) *Centerpartiet* atau *the Centre Party*, partai ini memberikan perhatiannya pada ekonomi nasional Swedia dan beraliansi dengan partai moderat, liberal dan kristen demokrat.
- 6) *Vänsterpartiet* atau *the Left Party*, memberikan fokus perhatian pada area pekerjaan, pelayanan kesejahteraan dan kesetaraan gender, partai ini juga menentang bergabungnya Swedia dengan Uni Eropa pada tahun 1995 dan sampai saat ini masih menyokong keluarnya Swedia dari Uni Eropa.
- 7) *Folkpartiet Liberalerna* atau *the Liberal Party*, dikenal sebagai partai yang konservatif selama beberapa tahun terakhir dan fokus perhatiannya ditujukan

pada perbaikan sistem sekolah, selain itu juga menginginkan bergabungnya Swedia kedalam NATO dan investasi terhadap nuklir power, partai ini beraliansi dengan partai moderat, partai tengah dan krissten demokrat.

- 8) *Kristedemokraterna* atau *the Christian Democrats*, yang memberi fokus perhatian pada 4 isu utama yaitu elderly care untuk para lansia, childcare untuk para ibu dan anak, dan juga keinginan untuk menyederhanakan regulasi perusahaan dan penurunan pajak dan partai ini beraliansi dengan partai moderat, partai tengah dan liberal (The Swedish Institute, 2017).

2.2 Partai Hijau Swedia atau *Miljöpartiet de gröna* di Riksdag

Dalam sub-bab ini penulis memilih untuk membahas Partai Hijau Swedia secara khusus, meskipun terdapat beberapa partai yang lebih besar darinya sebagaimana yang disebutkan penulis dalam sub-bab sebelumnya. Alasan dilakukan pembahasannya secara khusus, adalah karena Partai Hijau Swedia merupakan bentuk dari kelompok *environmentalist* formal yang berkecimpung di dalam ruang Pemerintahan Swedia. Kendati Partai Hijau Swedia atau *Miljöpartiet de gröna* bukanlah partai terbesar yang ada di negara Skandinavia tersebut, kelompok hijau ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan. Oleh sebab itu pembahasan terkait eksistensi *Miljöpartiet de gröna* ini menjadi sangat penting karena akan memiliki keterkaitan erat dengan jawaban utama dari pertanyaan inti yang terdapat dalam karya ilmiah ini.

Partai Hijau pada dasarnya adalah sebutan umum bagi partai yang memiliki fokus perhatian utama terhadap isu-isu lingkungan. Hal ini bisa dibuktikan dengan perbedaan nama dari Partai Hijau pada setiap negara-negara yang berbeda. Namun demikian, pada dasarnya pola terbentuknya partai ini memiliki kesamaan yang umum, yaitu karena penentangan terhadap kebijakan pemerintah dari negaranya yang merugikan kondisi lingkungan. Negara-negara di Eropa Barat sendiri termasuk Swedia, pola dari berbagai sistem partai tradisional telah mengalami pengikisan sejak awal tahun 1980an. Partai-partai yang berasal dari gerakan buruh seperti Sosial Demokrat, Sosialis, dan Komunis ataupun partai yang berlatar

belakang dari kaum borjuis seperti Kristen Demokrat, Konservatif dan Liberal telah mengalami penurunan di hampir setiap negara di Eropa Barat, termasuk Swedia. Hal tersebut dikarenakan perubahan sosial dalam masyarakat Eropa pasca Perang Dunia II yaitu sejak dimulainya era masyarakat industri. Pertumbuhan industri yang terjadi pasca Perang Dunia II secara bertahap telah menggeser isu polarisasi masyarakat antara kaum buruh dan kaum borjuis. Krisis ekologis menjadi isu baru yang muncul mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat pada era ini. Ideologi partai-partai tradisional yang hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi yang tak terbatas telah tergeser oleh ideologi dari gerakan lingkungan yang ada pada saat itu. sehingga tahun 1980-an menjadi panggung bagi eksistensi kelompok hijau di sepanjang Eropa, termasuk Swedia (Global Green, 2018)

Terangkatnya isu lingkungan kedalam agenda Pemerintah Swedia yang menjadi perhatian utama masyarakatnya saat ini, tentu saja melalui berbagai proses dan peran-peran para pelopornya dan bagaimana kepala pemerintah dan para penggerak kehidupan politik di Parlemen Swedia memberikan respon terhadapnya. Gelombang aktivisme lingkungan mulai meningkat secara terus menerus sejak Partai Hijau Swedia berhasil menerobos masuk ke dalam pemerintahan. Tahun 1988 merupakan masa kejayaan awal bagi kaum hijau yang duduk di kursi parlemen tersebut. Partai hijau tersebut merupakan partai baru yang pertamakali memasuki pemerintahan Swedia dalam 70 tahun terakhir.

Partai hijau di Swedia memiliki nama *Miljöpartiet de gröna* (atau yang biasa disingkat dengan MP) berdiri sejak tahun 1981, yang tumbuh dari kumpulan beberapa kelompok *environmentalist* kecil yang tersebar diseluruh penjuru negeri Swedia. Berdasarkan analisis politik Tomas Ramberg dari Radio Swedia, mengatakan bahwa berdirinya partai tersebut merupakan tanggapan atas ketidakpuasan mengenai kebijakan-kebijakan terkait lingkungan dari partai-partai yang ada. Partai tersebut berdiri setahun setelah dilakukannya referendum terhadap nuklir yang diadakan pada tahun 1980. MP memiliki ciri khas yang agak berbeda dengan partai lainnya, yaitu ketiadaan pemimpin partai yang pada umumnya dimiliki oleh partai-partai lain. Tetapi, sebagai gantinya partai ini

memiliki dua juru bicara yang selaluterdiri dari dari satu pria dan satu wanita. Juru bicara selalu diganti dalam setiap bulan dan dalam partai ini juga tidak ada dewan partai (Swedish Green Party, 2017).

MP secara kuat memberikan fokus perhatian yang sangat jelas pada masalah lingkungan. *Environmentalisme* memiliki tradisi yang cukup lama di Swedia sebelum munculnya partai hijau. Akar dari terbentuknya partai hijau ini diawali dengan pergerakan masyarakat Swedia dan organisasi lingkungan. Tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an menjadi awal dari kemunculan gerakan lingkungan di Swedia yang biasa disebut dengan ‘Pergerakan Sosial Baru’. Mereka mendedikasikan dirinya unntuk gerakan melindungi lingkungan. Diantara jenis gerakan lingkungannya seperti, perlindungan terhadap sungai, penentangan terhadap pembangunan jalur cepat pada daerah pedalaman yang sebelumnya tak pernah tersentuh, maupun gerakan untuk menangani persoalan kemacetan yang terjadi di setiap kota-kota besar Swedia. Pada saat itu, banyak dari kelompok-kelompok hijau semacam itu yang hanya bersifat temporal. Jadi setelah berhasil memecahkan suatu persoalan lingkungan, mereka langsung membubarkan diri. Ada pula jenis kelompok hijau yang sifatnya permanen dengan membentuk organisasi yang bahkan masih ada hingga saat ini.

Pada awal-awal terbentuknya, MP bisa dibilang sangat radikal sifatnya yang dibuktikan dengan keinginan untuk segera menutup tenaga nuklir, peningkatan kembali militer dan permintaan untuk mempersingkat jam kerja. Dulunya partai ini sangat menghindari kerja sama dengan partai lain agar tidak mengorbankan tujuan partai mereka. Namun demikian, partai ini tidak hanya partai yang anti-nuklir. MP memiliki bidang yang cukup luas terkait ideologi maupun persoalan lingkungan yang dibicarakan olehnya. Partai hijau ini juga sangat aktif dalam berbagai isu selain lingkungan. Seperti menjadi penyokong atas pemotongan biaya anggaran pertahanan, menentang bergabungnya Swedia dengan Komunitas Eropa, mendukung distribusi pendapatan yang lebih sejajar, menentang adanya danah untuk gaji pekerja, dan bahkan yang paling radikal menentang BUMN. Berbagai aksi tersebut menunjukkan bahwa dalam platformnya partai ini menggambarkan ideologinya yang tidak mendarat dalam spektrum politik

manapun melainkan lebih didasarkan pada solidaritas dengan alam dan umat manusia. Adapun yang menjadi unik dari partai ini adalah pengabaian terhadap tradisi yang terpisah antara sayap kiri dan sayap kanan.

Seiring dengan berjalannya waktu, kenyataan politik dalam beberapa tahun terakhir sebelum MP berhasil memasuki Riksdag, telah menekan partai hijau ini untuk condong ke sayap kiri. Keengganan untuk memihak yang sebelumnya ditekankan olehnya, telah memudar dan MP mulai terbuka dengan kerja sama. Partai hijau ini telah menjadi lebih condong ke kiri sejak mereka mulai berkolaborasi dengan Partai Demokrat Sosial dan Partai Kiri. Dalam pemilihan terakhir, partai kiri dan partai hijau sangat kuat di kota-kota besar. Sebagian besar pemilih berasal dari kalangan para pelajar muda dan dukungan terbesarnya sebagian besar berasal dari wilayah kota.

Meskipun pada tahun 1980-an persoalan lingkungan menjadi sangat menonjol di Swedia, MP belum bisa mencapai proporsi dukungan yang bisa membawanya ke kursi Riksdag pada puncak akhir tahun itu. Dukungan terhadapnya sangat fluktuatif saat itu. Sejak tahun 1998, partai hijau Swedia mendukung dan bekerja sama dengan sebuah partai besar yang terus mendominasi Riksdag selama masa pemerintahannya yaitu partai Sosial Demokrat. Situasi pada tahun itu sangat berbeda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Isu lingkungan pada pemilihan umum tahun 1988 menjadi berada di puncak agenda politik. Isu lingkungan saat itu sangat kuat mendominasi berbagai isu politik yang ada dalam kampanye pemilu, bahkan tidak pernah ada isu politik yang sedominan itu di tahun-tahun sebelumnya sebagaimana isu lingkungan yang memuncak pada tahun 1988. MP menerima 5,5% suara dan mendapatkan 20 kursi di Riksdag. Partai ini menjadi partai pertama yang bisa mendobrak sistem partai tradisional yang cukup kuat di Swedia dalam 70 tahun terakhir. Selama periode tersebut partai hijau Swedia memiliki pengaruh yang cukup kuat dan berkat hal itu ada beberapa pencapaian besar yang telah didupakannya, antara lain, terealisasinya pajak kemacetan di Stockholm (meskipun pada awalnya tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakatnya), regulasi cuti yang dipermudah, penghematan besar dalam anggaran pertahanan militer, dan anggaran Swedia untuk

pembangunan negara mengalami pertumbuhan serta menjadi salah satu yang terbesar di dunia secara relatif (Richardson & Rootes, 1995: 95).

Pada tahun 1991, Partai Hijau Swedia sempat mengalami kegagalan di ambang pemilihan namun bisa bangkit dan kembali lagi pada tahun 1994 ke kursi parlemen dan sejak saat itu terus bertahan sampai sekarang. Partai ini juga terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun seperti perubahan dalam lamanya periode juru bicara bertahan yang sebelumnya diubah dalam sebulan sekali. Memiliki anggota kurang lebih sebanyak 11.800 partai ini sekarang dianggap sebagai partai yang serius dan memiliki potensi untuk dijadikan koalisi oleh berbagai partai lainya termasuk yang sebelumnya merupakan oposisinya.

Dengan berkoalisi dengan Partai Sosial Demokrat, Partai Hijau Swedia mendapatkan posisi yang semakin kuat di pemerintahan. Sejak pemilu terakhir yang diadakan oleh Swedia pada tahun 2014, partai hijau ini berada di pemerintahan secara bersama-sama dengan partai Sosial Demokrat dan menjadi partai terbesar keempat di Swedia. Terlebih lagi Perdana Menteri Swedia merupakan ketua dari partai Sosial Demokrat. Dalam hal ini sedikit banyak, hal tersebut memberikan pengaruh terhadap eksistensi dari partai hijau dalam pemerintahan. Secara logis kecenderungan Partai Sosial Demokrat sebagai partai terbesar di Swedia untuk bekerjasama dengan partai kecil seperti MP, dilakukan untuk memperkuat posisinya di era menonjolnya isu lingkungan pada era industri saat ini. Pada dasarnya koalisi dilakukan karena adanya kepentingan yang sama yang ingin diwujudkan. Jika dilihat dari sudut pandang tersebut, maka bisa dianalisis dari visi Stefan Löfven yang berbunyi (The Swedish Institute, 2017):

“Our country must be a leading and inspirational force in the world. A country in which we close gaps and fulfills the promises of freedom we have made to our children, where we invest together in people and the environment, in knowledge and competitiveness, in security in the present and hope for the future”

(Negara kita sudah seharusnya menjadi pemimpin dan inspirasi bagi dunia. Yaitu sebagai sebuah negara yang menutup berbagai gap dan memenuhi janji-janji kebebasan yang kami buat untuk anak-anak kami, dimana kami berinvestasi bersama-sama dengan masyarakat dan

lingkungan, dengan pengetahuan dan kompetisi, dengan keamanan di masa sekarang dan harapan untuk masa depan)

Dari pernyataan Löfven tersebut, terdapat beberapa visinya yang hampir menyerupai isi kandungan dari nilai-nilai hijau yang dianut oleh partai hijau Swedia. Terlebih lagi dengan penyebutan secara spesifik terhadap pernyataan terkait investasi terhadap lingkungan. Dalam hal ini, bisa dilihat bahwa dengan melakukan kerja sama bersama Partai Sosial Demokrat, partai hijau bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah Swedia.

Moto utama yang sering dibawakan oleh MPsaat melakukan kampanye adalah “*Modernizing Sweden*”. Dalam hal ini tujuannya secara spesifik adalah untuk memodernisasi negara dengan berinvestasi pada transportasi publik, perumahan yang baik dan energi terbarukan. Terlepas dari investasi tersebut, partai hijau Swedia juga menginginkan masyarakat yang lebih setara dan lebih beragam dalam keseluruhan lapisannya, makanan yang bergizi dan jam kerja yang lebih singkat untuk mendapatkan waktu yang lebih banyak bagi para orang tua agar pengawasan terhadap anak-anaknya mengalami peningkatan. Selain itu, partai hijau Swedia juga menangani isu-isu migrasi (The Swedish Institute, 2017)

MP memposisikan dirinya dalam keseluruhan level politik yang ada, mulai dari pemerintahan nasional atau pusat, pemerintahan regional dan pemerintahan lokal Swedia, Selain itu juga di level parlemen Uni Eropa. Saat ini, juru bicara yang mewakili partai tersebut adalah Isabella lövin dan Gustav Fridolin. Kolaborasinya dengan Partai Demokratik Sosial di dalam pemerintahan telah membawa hasil berupa 6 kursi dari 24 kursi kementerian, dan pada pemilihan umum terakhir yang di selenggarakan pada bulan September 2014 partai hijau Swedia berhasil memperoleh 6,89% suara yang menghasilkan 25 kursi dari keseluruhan total kursi parlemen yang berjumlah 349. Selain itu, pada pemilu tingkat parlemen Eropa bulan Mei 2014, Partai Hijau Swedia memperoleh 15,4% sehingga memperoleh kursi sebagai member kelompok hijau yang ditempatkan di Brussels dan Strasbourg (Swedish Green Party, 2017)

Keberhasilan MP dalam mendapatkan kursi di berbagai level pemerintahan Swedia merupakan jalan utama baginya untuk merealisasikan berbagai kepentingan terkait penanganan isu lingkungan melalui berbagai program yang dibawanya. Hal tersebut membuktikan bahwa eksistensi dari kelompok *environmentalist* ini sangatlah berpengaruh bagi pembangunan Swedia yang berwawasan lingkungan.

2.3 Keterlibatan *Miljöpartiet de gröna* dalam Perkembangan Isu Lingkungan di Swedia

Dari sub-bab sebelumnya sangat terlihat jelas bahwa partai hijau Swedia atau *Miljöpartiet de gröna* merupakan partai yang memberikan fokus perhatian terhadap berbagai isu lingkungan. Tujuan utama yang ditekankan adalah untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan yang menangani perubahan iklim dan secara bersamaan juga menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Swedia. Meskipun fokus perhatian dari partai hijau Swedia ini adalah isu lingkungan, namun program-program yang dijalankan sangat banyak dan mencakup berbagai bidang, karena dalam setiap bidang yang dijalankan akan selalu memberikan efek bagi lingkungan.

Partai hijau Swedia merupakan bagian dari gerakan global yang berjuang bagi dunia agar semua manusia di dalamnya bisa mendapatkan kehidupan yang baik, tanpa mengabaikan kondisi para generasi di masa yang akan datang. Arah politik yang diambil oleh partai hijau didasarkan pada pandangan yang holistik, yang artinya adalah segala sesuatunya menjadi terhubung satu sama lain. Politik dari partai hijau Swedia didasarkan pada tiga solidaritas, antara lain :

- Solidaritas dengan binatang, alam dan sistem ekologi
- Solidaritas dengan generasi di masa yang akan datang
- Solidaritas dengan seluruh masyarakat dunia

Kelompok hijau Swedia percaya bahwa ada banyak cara untuk menjadi masyarakat yang hijau. Oleh sebab itu analisisnya terhadap pembentukan masyarakat yang hijau didasarkan pada sudut pandang yang holistik. Selain memberikan perhatian pada lingkungan, kelompok hijau ini juga menekankan

solidaritas dan kesetaraan gender dengan memberikan perhatian lebih pada hak-hak kaum wanita dan gerakan perdamaian.

Fokus utama dari MP tertuju pada persoalan *climate change*, karena tidak hanya berefek pada kehidupan individu masing-masing dari masyarakat Swedia tetapi juga perekonomian global dan kelangsungan hidup seluruh bangsa di dunia. Hal tersebut sudah menjadi masalah umum yang setiap orang sudah mengerti. Hal yang paling vital adalah bahwa emisi gas rumah kaca terus mengalami peningkatan, dan partai hijau menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban bagi Swedia untuk bertanggungjawab dalam mengurangi *climate-change* sebagai akibat dari ulah manusia. Karena menurut kelompok hijau, Swedia merupakan salah satu dari negara yang paling awal melaksanakan industrialisasi dan telah mempunyai tanggungjawab secara historis sebagai penyebab emisi saat melaksanakan pembangunan negaranya.

Partai hijau Swedia berupaya untuk menjadikan Swedia sebagai pemeran utama dalam negosiasi perubahan iklim secara internasional dan mengembangkan kerjasama untuk penanganannya diantara berbagai negara. Hal tersebut merupakan komitmen partai hijau untuk melakukan pengurangan terhadap emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan dalam level global. Untuk mencapai tujuan terkait persoalan perubahan iklim, menurutnya langkah yang harus diambil adalah dengan meningkatkan kemajuan di bidang teknologi yang ramah lingkungan, konsumsi energi dan sumber daya alam yang dimiliki harus berada di level yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, mereka berupaya untuk mengajukan kebijakan-kebijakan yang bisa memfasilitasi transisi gaya hidup yang sifatnya lebih bisa berkelanjutan.

Dalam upayanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca atau pencegahan perubahan iklim, partai hijau Swedia telah mengajukan beberapa program yang mana setiap program memiliki kontribusi bagi pengurangan emisi gas rumah kaca tersebut. Program-program itu diantaranya sebagai berikut, *Climate-Smart Housing*, pencapaian terhadap energi terbarukan hingga 100%, pencapaian terhadap sasaran-sasaran yang berkaitan dengan lingkungan (seperti perlindungan terhadap hutan dan laut, dan mengurangi penggunaan zat-zat kimia), investasi

untuk pendidikan, kebijakan luar negeri yang sifatnya memperjuangkan hak-hak wanita dan berkaitan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Swedish Green Party, 2017).

Dalam kaitannya dengan sampah, persoalan sampah yang merupakan suatu permasalahan yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan industri suatu negara. Sampah menjadi bagian dari persoalan yang berhubungan dengan lingkungan. Dalam sebuah kemajuan ekonomi yang instant, hampir selalu terjadi *eksternalitas*¹³ yang memiliki kecenderungan membahayakan lingkungan. Penanganan atas persoalan sampah merupakan bagian dari cara mengurangi potensi perubahan iklim yang menjadi target utama dari partai hijau Swedia. Persoalan sampah berkaitan erat dengan masalah peningkatan gas emisi rumah kaca dan perubahan iklim. Oleh sebab itu pengelolaan terhadap sampah adalah hal yang vital untuk ditekankan kepada masyarakat Swedia.

Tidak mudah bagi pemerintah Swedia untuk memberikan pengertian terhadap masyarakatnya tentang arti penting pengelolaan sampah mulai dari *reduce, reuse*, hingga *recycle*. Sampai akhirnya partai hijau Swedia ikut terlibat dalam hal itu yang dibuktikan dengan pengajuannya terhadap pemerintah terkait peningkatan pajak lingkungan. Misalnya pada tahun 1991, mereka mengajukan kenaikan yang tinggi terhadap pajak bahan bakar dan kekuatan nuklir dan pajak bagi tempat pembuangan sampah. Hal ini butuh waktu yang tidak sebentar untuk mengkampanyekan kesadaran masyarakat Swedia untuk tidak membuang sampah sembarangan agar bisa didaur ulang ataupun digunakan kembali. Hampir membutuhkan waktu sekitar 30 tahun, dimulai sejak diterapkannya pajak lingkungan tersebut hingga saat ini masyarakat Swedia menjadi masyarakat yang mengerti arti kebersihan dan menjadi nomor satu dalam hal pengelolaan sampahnya. Pengelolaan sampah Swedia yang sangat maju menyebabkan pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir menjadi berkurang secara drastis hingga jumlahnya mencapai 1%, sedangkan di sisi lain melalui komitmen terhadap program pencapaian energi terbarukan hingga 100%, hal tersebut

¹³*Eksternalitas*, merupakan biaya yang harus ditanggung oleh orang lain akibat aktivitas ekonomi dari pihak tertentu. Nicholson, Walter. 1999. *Pengertian Eksternalitas*. Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/8151/3/bab%202.pdf> pada 14 Januari 2019

akhirnya mendorong Swedia menerapkan kebijakan impor sampah yang digunakan untuk program *waste-to-energy*, karena jumlah sampah Swedia yang terlampaui sangat sedikit (Sheffield, 2016)

Partai Hijau Swedia memandang perlunya menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih modern, karena tidak memungkinkan bagi kondisi alam yang memiliki sumber daya alam terbatas untuk menerima kebijakan ekonomi yang lama. Pembangunan ekonomi dalam dekade-dekade terakhir memang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, namun dalam waktu yang bersamaan konsumsi sumber daya alam juga mengalami peningkatan. Selain itu, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan juga semakin meningkat karena penggunaan energi yang murah yaitu dari batu bara dan minyak telah menyebabkan emisi gas rumah kaca yang lebih besar. Oleh sebab itu, dibutuhkan perubahan kebijakan ekonomi yang lebih bersifat jangka panjang dan berkelanjutan yang sangat berkaitan erat dengan perubahan dalam sistem energi yang digunakan. Oleh karena itu, kelompok hijau sangat menekankan adanya kebijakan terkait pencapaian energi terbarukan yang lebih efisien hingga 100% . Penerapan kebijakan impor sampah merupakan salah satu upaya untuk merealisasikan kebijakan tersebut (Haute, 2016: 16).

BAB 3

ISU SAMPAH & KEBUTUHAN ENERGI SWEDIA

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa isu yang berkaitan dengan lingkungan telah menjadi perhatian utama sejak industri-industri di Swedia semakin intensif. Terlebih lagi naiknya wakil kelompok hijau (dalam bentuk partai hijau) ke dalam panggung pemerintahan. Partai hijau sendiri memiliki sudut pandang yang holistik dalam menangani isu lingkungan dan pembentukan masyarakat yang hijau. Dengan tujuan utama terkait penanganan perubahan iklim, kelompok *environmentalist* Swedia berupaya mempengaruhi pemerintah untuk membagi perhatiannya kepada setiap permasalahan yang berkorelasi dengan sasaran utama tersebut.

Perekonomian kontemporer telah membawa serangkaian keuntungan yang juga selaras dengan dampaknya. Sebelumnya dalam bab pendahuluan telah disebutkan bahwa signifikansi masalah sampah terus meningkat seiring dengan pertumbuhan industri yang pesat dan masalah peningkatan sampah secara langsung menjadi bagian dari isu lingkungan di Swedia. Selain itu, penggunaan energi untuk kebutuhan perekonomian modern yang semakin kompleks juga menjadi sorotan dan bagian dari pandangan holistik kelompok hijau. Kedua hal tersebut menggambarkan kondisi lingkungan Swedia yang kemudian berkaitan erat dengan keterlibatan kelompok *environmentalist* di negara Skandinavia tersebut. Oleh sebab itu, dalam bab ini sangat diperlukan pembahasan mengenai isu sampah dan gambaran kebutuhan energi di Swedia.

3.1 Isu Sampah di Swedia

Persoalan sampah Swedia menjadi penting untuk dibahas agar penulis dapat menganalisis tujuan dilakukannya kegiatan impor sampah Pemerintah Swedia yang semakin intensif dan bagaimana implikasi yang didapat atas keputusan yang dijalankan tersebut. Karena dengan demikian, penulis dapat memberikan jawaban secara komprehensif dalam bab selanjutnya. Sub bab ini berisikan tentang kondisi

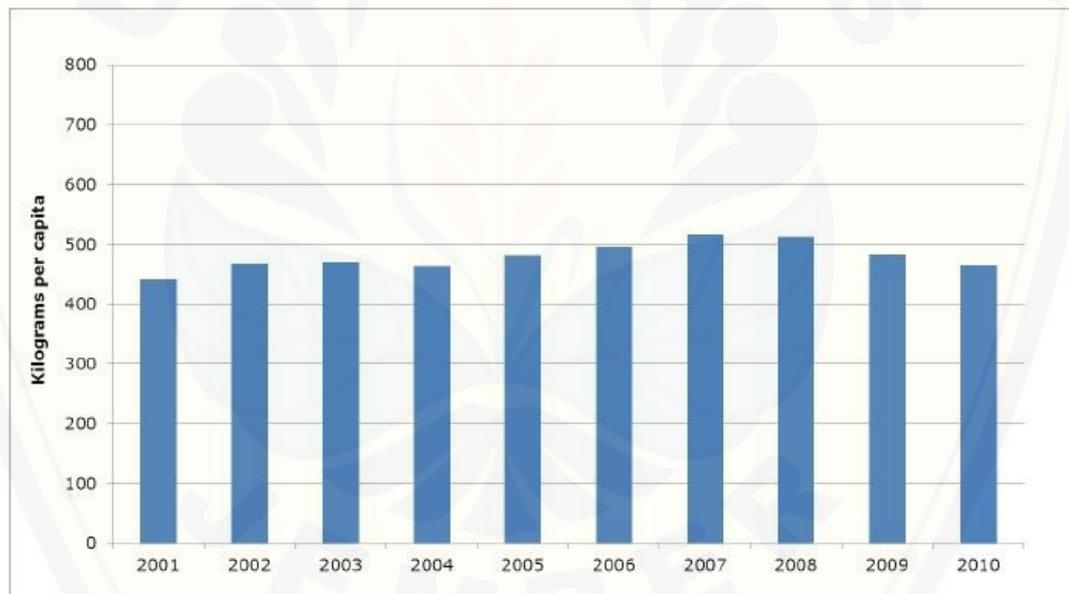
sampah di Swedia, kebijakan terkait sampah di Swedia dan manajemen sampah Swedia.

3.1.1 Kondisi Sampah di Swedia

Dalam dekade terakhir, persoalan sampah menjadi sesuatu yang semakin tidak terhindarkan. Sebagaimana yang telah disebutkan di bab pendahuluan, bahwa persoalan sampah mulai mengalami peningkatan sejak industri-industri besar semakin intensif. Budaya konsumerisme dalam masyarakat sebagai dampak kemajuan teknologi dan peningkatan populasi telah mendorong timbulnya problematika sampah yang semakin intens. Data-data yang telah disebutkan sebelumnya telah membuktikan bahwa sampah terus mengalami peningkatan yang drastis dari tahun ke tahun. Selain dipengaruhi oleh laju perkembangan ekonomi dan urbanisasi dalam suatu wilayah, tingkat pertumbuhan sampah juga dipengaruhi oleh tenggat waktu pemakaian barang oleh masyarakat dimana hampir 99% barang-barang yang dibeli oleh mereka rata-rata dalam 6 bulan sudah menjadi tak terpakai atau menjadi sampah. Hampir setiap negara mendapati volume sampahnya di tempat pembuangan terus mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya (Murphy, 2017).

Bagi setiap negara menghasilkan sampah merupakan sebuah keniscayaan, terlebih lagi di era ekonomi kontemporer saat ini. Produksi sampah menjadi sesuatu yang tak terhindarkan bagi setiap orang karena dorongan dari keberlangsungan pembangunan ekonomi. Sedangkan penumpukan sampah sangat tidak bersahabat dengan alam dan memiliki dampak negatif terhadap kehidupan disekitarnya. Dekomposisi antara sampah dengan tanah dan air tanah di tempat pembuangan menyebabkan terjadinya produksi gas methane yang akan lepas ke atmosphere dan menyebabkan emisi *Gas Rumah Kaca* (GRK). Hal itu yang kemudian mendorong setiap negara untuk mengupayakan pengurangan pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir atau *landfills*. Seperti Uni Eropa yang mengeluarkan perintah untuk mengurangi pembuangan sampah *kelandfills* kepada setiap anggota negaranya, yang salah satunya adalah Swedia (Reichel, 2014).

Perhitungan jumlah sampah yang dilakukan oleh suatu negara biasanya didasarkan pada jumlah sampah kota atau *Municipal Solid Waste* (MSW). MSW inilah yang biasanya dibuang ke *landfills* (TPA). MSW terdiri dari sejumlah besar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, dan juga sampah-sampah yang hampir serupa yang dihasilkan dari bisnis-bisnis kecil dan institusi publik yang dikumpulkan oleh setiap kota di *landfills* atau TPA masing-masing. Jenis sampah dari kota ke kota mungkin sangat bervariasi dan berbeda-beda, hal itu tergantung dari sistem manajemen sampah lokalnya. Sampah dari industri dan pertanian tidak dihitung sebagai *Municipal Solid Waste* (Chandler, et al., 1997). Tidak jauh berbeda dengan negara-negara lain yang ada di dunia, Swedia juga menghasilkan sampah yang bisa dibilang jumlahnya tidak sedikit setiap tahunnya. Berikut ini adalah diagram yang memaparkan tingkat produksi sampah yang dihasilkan Swedia hingga tahun 2010 :

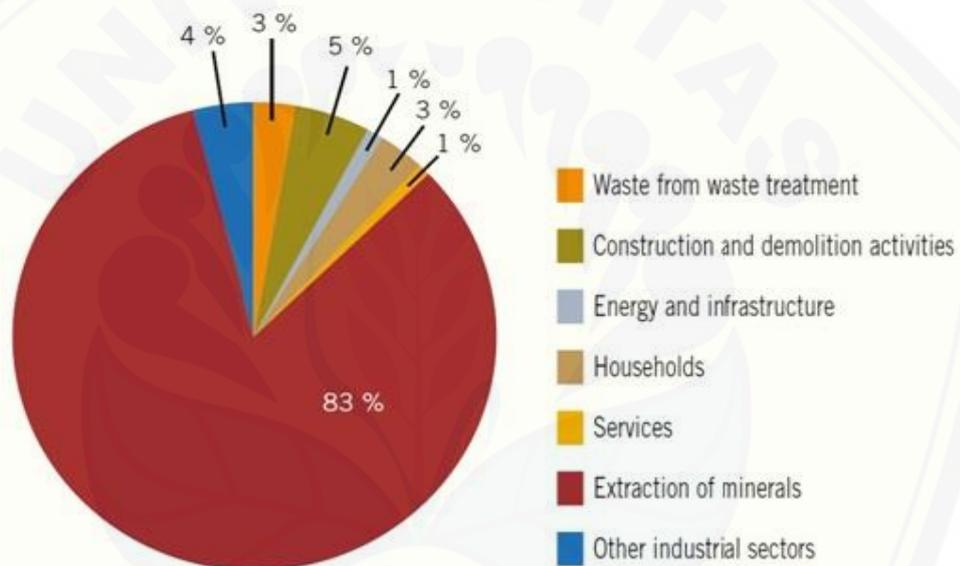


Gambar 3.1 Jumlah MSW Yang dihasilkan Swedia dalam Hitungan Kilogram/kapita Dari Tahun 2001-2010

Sumber : Milios, Leonidas. 2013. *MSW Generation per capita in Sweden*. Copenhagen : European Environment Agency

Diagram dalam Gambar 3.1 menunjukkan bahwa *Municipal Solid Waste* yang dihasilkan oleh Swedia setiap tahun jumlahnya cukup dinamis, yang artinya mengalami kenaikan dan penurunan secara random namun dengan selisih yang tidak terlalu jauh. Kenaikan yang paling memuncak sempat terjadi pada tahun

2008 yang menghasilkan hampir 5 juta ton sampah. Rata-rata MSW yang dihasilkan oleh Swedia berjumlah sekitar 4,4 juta ton per tahun. Sampah yang dihasilkan cukup beragam yang diantaranya berasal dari aktivitas pembangunan maupun pembongkaran suatu gedung sekitar 5%, infrastruktur dan energy 1%, sampah rumah tangga dan industri jasa sebanyak 3%, dan sebanyak 83% sampah dari ekstraksi mineral dan 4% dari sektor industri lain. Selain itu terdapat sampah makanan yang dihasilkan oleh masyarakat Swedia. Berdasarkan data statistik tahun 2012, jumlah sampah makanan rata-rata dalam setahun adalah sekitar 1,2 juta ton yang berasal dari industri makanan, restoran, perdagangan dan juga sampah makanan rumah masyarakat (Nyström, 2012).



Gambar 3.2 Daftar Pembagian Jenis Sampah Yang diproduksi Oleh Swedia

Sumber : Nyström, A, K. (2012). *Swedish waste statistics*. Diakses dari https://unstats.un.org/unsd/environment/fdes/EGES3/6Sweden_Swedish%20waste%20statistics.pdf pada 6 Maret 2018

Dengan berbagai macam sampah yang dihasilkan oleh Swedia tersebut, tentu saja sampah menjadi hal yang harus diperhatikan dan ditangani. Oleh sebab itu Pemerintah Swedia melakukan berbagai upaya melalui kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mendorong masyarakatnya agar mengurangi pembuangan sampah ke *landfills*. Secara historis Swedia memang memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan lingkungan sejak tahun 1969, terutama yang berkaitan

dengan sampah. Hal tersebut dibuktikan dengan dibuatnya regulasi *The Environment Protection Act* yang mengenalkan fasilitas penanganan sampah yang baru. Undang-undang tersebut berisi tentang usaha untuk menangani lingkungan dari pencemaran dan kerusakan lainnya dengan menetapkan sasaran kualitas lingkungan dan berbagai program untuk menanganinya (EPA Victoria, 2016). Setelah itu, sekitar tahun 1990-an Pemerintah Swedia mulai mengeluarkan beberapa regulasi terkait sampah sebagai langkah untuk mengurangi pembuangan sampah ke TPA. Pada tahun 1999 misalnya sebuah regulasi dengan nama Kode Lingkungan atau *The Environmental code of 1999* dikeluarkan sebagai pengganti dari regulasi sebelumnya, yang di dalamnya terdapat 15 hukum yang mengatur keseluruhan dampak lingkungan dalam kerangka kerja pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan bagi Swedia. Hal tersebut melibatkan berbagai aktor dalam setiap cabang pemerintahan, yang artinya tidak hanya dikendarai oleh pemerintah pusat dalam mengarahkan pengelolaan sampah masyarakatnya. Setiap pemerintah kota diwajibkan memiliki rencana manajemen sampah dan memikul tanggungjawab masing-masing terkait manajemen pengumpulan dan pembuangan sampah rumah tangga warganya, kecuali sampah dari produk yang sudah menjadi tanggungjawab produsennya (Milios, 2013).

Bagi Pemerintah Swedia menerapkan strategi manajemen sampah yang telah direncanakan bukanlah hal yang mudah. Karena hal tersebut tidak cukup untuk memberikan pemahaman mengenai manajemen sampah kepada masyarakatnya secara keseluruhan, Sehingga dibutuhkan upaya-upaya yang sedikit memaksa misalnya kebijakan dalam menetapkan pajak TPA yang cukup tinggi pada tanggal 1 Januari tahun 2000. Penerapan pajak TPA tersebut telah berhasil membuktikan perannya yang signifikan dalam menyokong masyarakat untuk melakukan daur ulang dan pembakaran. Pajak TPA semakin ditingkatkan pada tahun 2002 hingga 2006 dan berjalan secara sejajar dengan tingkat kenaikan daur ulang terhadap sampah kota (MSW). Selain itu larangan bagi pembuangan sampah jenis organik juga diterapkan pada tahun 2002.

Keberhasilan dari penerapan strategi pengelolaan sampah, peraturan-peraturan seperti larangan pembuangan ke TPA dan pajak yang tinggi untuk TPA

telah membawa Swedia sebagai pemimpin global dalam hal pengelolaan sampah. Kerangka kerja manajemen sampah Swedia bersifat jangka panjang dan sistem manajemen sampahnya terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Swedia juga terus mengembangkan teknologi baru dan berinvestasi terhadap infrastruktur pengelolaan sampahnya. Selain itu, pemerintah kota dengan perusahaannya juga melakukan kerjasama terkait manajemen sampah dengan para pemain swasta. Pengelolaan sampah yang maju tersebut telah berhasil menyisakan hanya 1% dari keseluruhan jumlah sampah Swedia yang dibuang ke TPA. Sebagian besar lainnya telah ditangani dengan baik melalui daur ulang yaitu sebanyak 33%, dan 16% untuk dijadikan kompos, serta pembakaran sebanyak 50% (Milios, 2013).

Bagi sebagian besar negara, keberhasilan dalam menyisihkan sampah hingga mencapai 1% ke *landfills* merupakan suatu hal yang luar biasa sulit untuk dicapai. Karena dengan demikian, permasalahan sampah di negaranya telah teratasi dengan sangat baik. Terlebih lagi berkat hal tersebut kewajiban Swedia sebagai anggota Uni Eropa dalam mencapai target “zero waste” pada tahun 2020 sudah hampir tercapai meskipun masih dibutuhkan angka 17% lagi untuk target daur ulang. Namun anehnya, meskipun Swedia berhasil mengurangi jumlah sampahnya, Swedia justru menambah jumlah volume sampah dalam negerinya dengan melakukan aktivitas impor sampah dari negara-negara tetangganya. Hal tersebut sebagaimana yang telah penulis jabarkan dalam bab pendahuluan, bahwa pada beberapa tahun terakhir aktivitas tersebut semakin intens dan tingkat sampah yang diimpor terus dinaikkan jumlahnya dari tahun ke tahun (Nicastro, 2017).

3.1.2 Kebijakan Terkait Sampah di Swedia

Regulasi terkait sampah di Swedia tidak lepas dari campur tangan Organisasi Uni Eropa dan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh setiap negara-negara anggotanya. Telah disebutkan sebelumnya oleh penulis bahwa Swedia bergabung menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 1995. Oleh karena itu, secara otomatis Swedia memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah menjadi target bersama anggota-anggota Uni Eropa. Masuk dalam keanggotaan Uni Eropa berarti Swedia mendapatkan persyaratan yang lebih

terperinci yang mengatur sampah khususnya yang berbahaya ataupun beracun, kemudian persyaratan terkait tempat pembuangan dan pembakaran sampah. Meskipun target yang ditentukan merupakan hal yang sama, masing-masing dari negara anggota Uni Eropa memiliki hak untuk menetapkan strategi kebijakannya sendiri dalam menangani persoalan sampah domestiknya, yang masih disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Kendati demikian, Swedia tentu harus terus mengembangkan partisipasinya dalam proses kerangka kerja Uni Eropa terkait pengelolaan sampah.

Secara general, tujuan utama dari kerangka kerja Uni Eropa terkait persoalan sampah adalah tempat pembuangan yang terisi lebih sedikit sampah, peningkatan daur ulang dan penanganan sampah yang ramah lingkungan. Sedangkan Swedia sendiri membuat undang-undang dan peraturan yang terus mengembangkan praktik pengelolaan sampah. Dalam hal ini, Swedia menerapkan hirarki proses pengelolaan sampah yang dimulai dengan pencegahan atau memperkecil volume sampah dan bahan sumbernya, pemulihan energi, dan pembuangan akhir. Peraturan yang berkaitan dengan praktik manajemen sampah Swedia memang cenderung mengarah pada perluasan tanggungjawab produsen. Maksudnya adalah bahwa produsen merupakan tempat awal mengalirnya barang-barang yang kemudian menjadi sampah, oleh sebab itu mereka yang harus mengemban tanggungjawab lebih besar untuk menutupi komponen aliran sampah tambahan, mengurangi pembuangan sampah yang tidak terawat dan tidak dipisah sebelum dibuang ke *landfills*.

Persoalan sampah merupakan bagian dari persoalan lingkungan, oleh sebab itu regulasi terkait sampah tercakup dalam regulasi lingkungan Swedia. Regulasi lingkungan di Swedia telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Undang-undang Pelestarian Alam yang disahkan pada tahun 1964 merupakan permulaan dari berbagai regulasi lingkungan. Kemudian diikuti dengan pembentukan Agensi Perlindungan Lingkungan yang biasa disebut dengan EPA (*Environmental Protection Agency*) pada tahun 1967. Padatahun berikutnya yaitu tahun 1968, Panitia Penasehat Lingkungan dibentuk yang bertugas sebagai konsultan pemerintah dalam urusan lingkungan. Disusul dengan disahkannya Undang-

undang Perlindungan Lingkungan pada tahun 1969, dan bersamaan dengan hal tersebut, Undang-undang terkait Produk Berbahaya bagi Kesehatan dan Lingkungan dibentuk dan disahkan pada tahun 1973, yang mana hal itu membentuk struktur utama perundang-undangan yang mengatur lingkungan di Swedia.

Undang-undang Pembersihan pertama yang diumumkan pada tahun 1972, di dalamnya berisi tentang kewajiban pemerintah kota untuk bertanggungjawab terhadap pengumpulan dan transportasi bagi sampah kota (*Municipal Solid Waste/MSW*) Swedia. Pada tahun yang sama, pemerintah kota juga dilimpahi tanggungjawab untuk memastikan penanganan sampah kota atau (MSW). Setiap kota akan dipandu oleh agensi perlindungan lingkungan (EPA) dan pemerintah setingkat kabupaten/daerah untuk membentuk undang-undang pembersihan masyarakatnya sendiri terkait pengelolaan sampah di wilayahnya. Biaya untuk sistem pengelolaan sampah kotanya (MSW) dibebankan pada setiap rumah tangga di daerah/kota masing-masing.

Swedia mulai melakukan pembakaran sampah secara besar-besaran sekitar tahun 1985. Lebih dari setengah sampah rumah tangga masyarakat Swedia dibakar dengan fasilitas insinerator yang disediakan oleh pabrik. Akhirnya, masih dalam tahun yang sama dipenghujung akhir sebuah kelompok penelitian di dalam Badan Perlindungan Lingkungan Nasional dibentuk untuk menyelidiki emisi yang dihasilkan dari pembakaran sampah kota (MSW) tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui potensi dari resiko kesehatan yang sangat berkaitan dengan emisi dioksin yang dihasilkan dan dengan demikian mereka bisa merumuskan program-program untuk menanganinya. Investigasi menghasilkan laporan bahwa pembakaran tersebut merupakan metode penanganan sampah rumah tangga dan sampah industri yang masih bisa diterima. Namun demikian, hal itu tergantung pada implementasi langkah-langkah penarikan emisi dari pabrik-pabrik yang ada atau yang ada di masa mendatang (National Renewable Energy Laboratory, 1995).

Pada tahun 1988 EPA mengeluarkan laporan dengan judul “Sampah Padat dan Lingkungan”. Laporan tersebut berisi tentang pembentukan strategi mengenai sasaran tertentu dalam hal perlindungan kesehatan dan lingkungan, penyelamatan

sumber daya alam, mendorong pertumbuhan ekonomi yang baik, strategi melindungi berbagai bahan yang strategis, dan mengeliminasi sampah. Beberapa strateginya, antara lain :

- Meminimalkan penggunaan bahan-bahan berbahaya dalam berbagai produk
- Memastikan secara tepat mulai dari pengumpulan, penanganan, dan pembuangan bahan-bahan berbahaya yang sulit dihindari tersebut.
- Meminimalkan produksi sampah
- Mendaur ulang sebanyak mungkin
- Dan menangani sampah yang tersisa dengan cara ramah lingkungan

Kebijakan terkait penanganan sampah terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Pada Bulan Mei 1990, Parlemen Swedia menyetujui sebuah program pengelolaan sampah yang bernama “Solid Waste and Environment” yang dibawa oleh EPA. Keseluruhan sasarannya antara lain :

- membatasi volume dan kandungan zat berbahaya dalam sampah
- meningkatkan daur ulang dan penggunaan kembali
- dan memperbaiki teknik dalam mengelola sampah-sampah yang tidak bisa dihindari, dikurangi, di daur ulang, ataupun digunakan kembali.

Kebijakan yang ada di dalam program ini memberi ketentuan bahwa :

- sampah adalah beban bagi lingkungan. Sehingga setiap produsen dari sampah harus bertanggungjawab atas sampah yang muncul akibat produksinya, termasuk juga tanggungjawab terkait biaya.
- Produksi harus bersih. Kandungan bahan berbahaya dari produk dan sampah harus dikurangi dengan cara mengganti bahan-bahan yang tidak terlalu berbahaya dan benar-benar membatasi penggunaan bahan kimia dan bahan-bahan lainnya yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.
- Pengurangan volume sampah harus dilakukan, dengan cara memperbanyak penggunaan kembali dan pemulihan sampah.

Kebijakan sampah pada tahun 1990-an lebih menekankan pada tanggungjawab produsen, sebagai pihak yang memunculkan aliran sampah. RUU Sampah tahun 1990 atau (*The Waste Bill of 1990*) berisi ketentuan yang mengharuskan pemerintah kota untuk mengembangkan rencana yang spesifik terkait sampah, tanggungjawab yang besar dibebankan kepada sektor komersial dan industri dalam menyediakan informasi bagi masyarakat di kotanya. Pemerintah kota juga diberi hak tambahan untuk bertanggungjawab dalam bagian lain dari aliran sampah. Pada tahun 1994, Pemerintah Swedia mengeluarkan perintah untuk memisahkan sumber sampah yang berbeda yang ditetapkan dan dilaksanakan hingga sedemikian rupa sebelum sampah-sampah tersebut dikirim ke TPA. Pemerintah juga membentuk dewan khusus yang mengelola penelitian tentang pengembangan produk dan manajemen sampah yang berwawasan lingkungan.

Badan Perlindungan Lingkungan atau *Environmental Protection Board* merupakan otoritas pemerintah pusat paling utama yang bertanggungjawab atas perlindungan lingkungan di Swedia. Sebagian besar keputusan yang berkorelasi dengan persoalan lingkungan termasuk sampah dibuat oleh badan ini. Namun, keputusan terkait lingkungan yang dibuat juga dipengaruhi oleh badan lain, termasuk Parlemen, Dewan Waralaba atau Perlindungan Lingkungan, Badan Pengendalian Produk, Pemerintah Kota dan Pemerintah tingkat Kabupaten. Mereka menggunakan cara yang tidak langsung untuk mempengaruhi dan mengendalikan kebijakan terkait manajemen sampah, diantaranya melalui upaya kerjasama dengan organisasi lain, mengeluarkan rekomendasi dan peraturan umum, konsultasi, penelitian dan juga pendidikan. Beberapa tugas yang menjadi tanggung jawab Badan Perlindungan Lingkungan yaitu memantau perkembangan teknologi baru dan mengusulkan perubahan yang direkomendasikan pada peraturan lingkungan. Selain itu hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan di bawah payung Undang-undang Perlindungan Lingkungan, pengendalian produk di bawah pengawasan dari Dewan Pengawas produk yang terikat dengan EPA, penanganan produk berbahaya yang berdasarkan Undang-undang Produk Berbahaya bagi Kesehatan dan Lingkungan, konservasi alam, rekreasi *outdoor* dan penelitian, semua hal itu menjadi tanggung jawab dari agensi

tersebut kecuali jika undang-undang yang bersangkutan menetapkan tanggung jawab secara spesifik terhadap badan-badan tertentu (National Renewable Energy Laboratory, 1995).

3.1.3 Praktik Manajemen Sampah di Swedia

Dalam upaya mencapai target manajemen sampah yang baik, pemerintah Swedia menggunakan pendekatan yang beragam mulai dari proses perizinan, perencanaan aktivitas, tindakan pengawasan dan sanksi. Hal tersebut merupakan bagian dari proses untuk sasaran utama Pemerintah Swedia yaitu perlindungan terhadap lingkungan. Selain beberapa hal tersebut, Pemerintah Swedia juga menggunakan instrumen ekonomi untuk mendorong masyarakat Swedia berperilaku ramah terhadap lingkungannya. Instrumen ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah tingkat pajak pada CO₂, Nox, dan emisi sulfur dan juga pajak yang berbeda-beda yang diperuntukkan bagi bahan bakar diesel sehingga dengan begitu, bisa merangsang penggunaan bahan bakar diesel sebagai bahan bakar yang memiliki nilai paling unggul menjadi lebih ramah lingkungan. Strategi ini merupakan yang paling efektif bagi pemerintah dan masyarakat Swedia. Swedia sendiri bahkan merupakan negara pertama yang menerapkan pajak tinggi dalam menangani persoalan lingkungan.

Pemerintah Swedia dalam proses penanganan sampah di dalam negaranya menggunakan teknik desentralisasi, dimana tanggungjawab untuk menegakkan hukum terkait lingkungan didistribusikan diantara pemerintah nasional, pemerintah kota dan pemerintah setingkat kabupaten sendiri. Pemerintah lokal dengan wewenangnya mewajibkan tiap industri yang memiliki aktivitas menghasilkan sampah untuk melaporkan jumlah sampah dan kandungan zatnya kepada otoritas lokal. Tiap kota juga diwajibkan untuk menyiapkan sebuah rencana sampah padat atau "*a solid waste plan*" untuk menangani keseluruhan sampah yang diproduksi di dalam kota, termasuk sampah domestik, sampah industri, sampah beracun, sampah rumah sakit, dan sebagainya. Pemerintah federal juga memberikan hak terhadap pemerintah kota untuk memperluas tanggung jawab mereka terhadap pengumpulan, transportasi, dan penanganan sampah domestik.

Sampah yang dihasilkan oleh Swedia sendiri komposisinya terdiri dari 35-45% kertas, 25-35% sampah dapur dan taman, sekitar 10% sampah plastik, 8% kaca, metal kurang lebih 4%, tekstil kurang lebih 4%, barang-barang dari kulit dan karet sebanyak 1%, kemudian kayu dan lainnya sebanyak 8%. Sampah-sampah tersebut termasuk sampah domestik Swedia yang bisa diperbaiki dan digunakan kembali. Sedangkan sampah lainnya seperti limbah industri dan semacamnya, membutuhkan penanganan khusus yang lebih intens. Berikut ini beberapa proses dari aktivitas manajemen sampah di Swedia, diantaranya :

a) Pengumpulan

Masing-masing kota di Swedia bertanggungjawab dalam melakukan pengumpulan sampah di kotanya. Pemerintah kota bekerjasama dengan agen pengelola sampah melalui sebuah kontrak atau persetujuan, mengumpulkan keseluruhan sampah domestik yang dihasilkan di Swedia tepatnya di masing-masing kota. Sepertiga dari wilayah kota menyediakan jasa pengumpul sampah di kotanya, melalui kontrak kerja sama dengan berbagai perusahaan swasta. Proses pengerjaan dalam pengumpulan sampah kotanya dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah separuh atau 50% sampah yang dihasilkan dikumpulkan langsung oleh agen pemerintah kota secara langsung dan 50% lainnya dilaksanakan oleh kontraktor swasta atas nama kota.

b) Daur Ulang/Recycling

Recycling merupakan suatu proses dalam mengubah material atau barang-barang yang seharusnya dibuang pada awalnya sebagai sampah untuk dijadikan sebagai produk baru yang bisa digunakan. Melalui pengumpulan yang sebelumnya telah disebutkan, barang-barang diproses untuk diubah kedalam bentuk baru. Proses ini adalah yang terbaik dalam hal penanganan sampah dan menduduki hirarki teratas dari jenis manajemen sampah. Karena daur ulang bisa mengurangi jumlah sampah yang seharusnya akan dibuang ke TPA. Sampah-sampah yang didaur ulang oleh Swedia antara lain, kertas, kaca, dan aluminium. Dari tahun ke tahun daur ulang dari ketiganya terus mengalami peningkatan. Stasiun daur ulang Swedia sebagian besar disebar di setiap daerah dengan jarak 300 meter dari pemukiman

warganya. Beberapa contoh daur ulang yang dilakukan diantaranya, sampah koran yang diubah menjadi kertas, botol plastik dicairkan dan diubah menjadi barang baru yang bisa digunakan kembali.

c) Pemrosesan, Penanganan, dan Pembuangan

Pembuangan adalah proses akhir dari pengelolaan sampah Swedia. Di Swedia sendiri terdapat sekitar 280 *landfills* sebagai tempat pembuangan akhir sampah domestiknya sejak tahun 1992. Sebanyak 90% dari *landfills* yang ada di Swedia, merupakan milik pemerintah kota dan dikontrol olehnya. Sebelum masuk ke tahap pembuangan, penanganan sampah dilakukan dengan cara pemilahan sampah itu sendiri kemudian diproses untuk dijadikan kompos dengan fasilitas yang dipisah yaitu fasilitas untuk pemilahan dan fasilitas untuk pengomposan. Dari tahun 1965 hingga tahun 1981 pemerintah kota di Swedia telah menginvestasikan lebih dari 1,4 Milyar Krona untuk fasilitas pemilahan dan pengomposan. Fasilitas tersebut secara mekanik memilah sampah ke dalam fraksi yang berbeda. Kemudian sebagian besar kompos yang dihasilkan biasanya digunakan untuk melindungi *landfills* atau TPA. Biasanya sampah yang dijadikan kompos adalah sampah dari sisa-sisa makanan.

Berbagai kebijakan terkait penanganan sampah yang terus digencarkan oleh Pemerintah Swedia pada akhirnya memberikan manfaat yang besar bagi masyarakatnya. Penanganan sampah yang terus diperbarui mendorong Swedia menjadi negara yang berbudaya maju dalam hal pengelolaan sampah baik dalam hal pemilahan dan daur ulang sampahnya. Bahkan berdasarkan laporan Anna Carin Gripwall, Direktur Komunikasi Avfall Sverige (Asosiasi Manajemen Sampah Swedia) bahwa sejak tahun 2016 Swedia mulai menggalakkan suatu kampanye dengan nama gerakan "*Miljonar-vanlig*". Gerakan tersebut bertujuan untuk mengurangi sampah Swedia dengan cara melakukan perbaikan, penggunaan kembali, atau memberikan hasil pengolahan sampah kepada orang lain. Selain itu Pemerintah Swedia juga terus berinvestasi dalam pengembangan fasilitas untuk sampah yang semakin canggih melalui proyek pengolahan sampah yang sedang digarap yaitu, pembuatan sistem penyedot sampah otomatis dari pemukiman warga. Hal tersebut akan menjadikan proses manajemen sampah di Swedia lebih

efektif dan efisien karena pemerintah tidak perlu lagi menyediakan truk-truk yang lebih banyak yang sebelumnya digunakan untuk mengangkut sampah, selain itu penyimpanan di bawah tanah lebih menghemat lahan dan menghilangkan bau sampah di wilayah publik (Sheffield, 2016).

3.2 Kebutuhan Energi Swedia

Sub bab ini menjelaskan tentang kondisi fisik negara Swedia yang berfokus pada persediaan energi Swedia. Penjelasan mengenai ketersediaan energi Swedia menjadi hal yang penting karena merupakan penyebab utama yang mendorong Swedia untuk menerapkan kebijakan impor sampah. Hal tersebut berkaitan dengan analisis penulis yang terdapat dalam bab sebelumnya. Sub bab ini diawali dengan menggambarkan dinamika ketersediaan energi di Swedia yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan energi dari negara ini. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kebijakan makro Swedia sebagai bagian dari negara anggota Uni Eropa. Perlunya menjelaskan tentang hal ini karena kebijakan yang diterapkan oleh Uni Eropa khususnya yang berkaitan dengan kebijakan energi akan secara langsung mempengaruhi kebijakan domestik dari Swedia.

Dalam perekonomian kontemporer, ketersediaan energi merupakan hal yang paling vital bagi setiap negara. energi memang selalu memainkan peranan penting dalam kehidupan setiap negara, namun perannya menjadi semakin krusial pada dekade-dekade terakhir karena industri yang semakin meningkat drastis dalam masyarakat. Kebutuhan energi yang terus mengalami peningkatan membawa dampak bagi terganggunya keamanan energi di sebagian besar negara-negara yang ada di dunia khususnya para negara pengimpor. Kondisi ketergantungan terhadap energi dari luar cenderung beresiko bagi keamanan nasional suatu negara. lebih jauh lagi jika ketergantungan diarahkan pada satu negara pemasok, maka negara tersebut rawan mendapatkan kontrol dari negara pemasok tersebut. Oleh sebab itu, keamanan energi menjadi hal yang sangat krusial bagi suatu negara. karena dampak yang paling parah dari terganggunya stabilitas keamanan energi bisa mengarah kepada konflik antar wilayah. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang efektif dalam mencegah dan menangani beberapa hal diatas, berikut ini

adalah 5 faktor yang dijadikan sebagai strategi keamanan energi oleh Komisi Uni Eropa tahun 2008 :

- Ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan diversifikasi pasokan energi
- Hubungan dengan pemasok energi eksternal
- Mekanisme dalam menanggapi krisis ketersediaan minyak dan gas
- Efisiensi energi
- Penggunaan sumber energi internal Uni Eropa yang sebaik mungkin

3.2.1 Ketersediaan Energi di Swedia

Sebelum terjadinya krisis minyak tahun 1970-an, Swedia mengalami ketergantungan minyak hingga sekitar 70%, batu bara dan kokas sekitar 10% dari pasokan energinya. Swedia tidak memiliki produksi minyak asli, yang artinya negara ini tidak memiliki sumber daya minyak dan gas alam di dalam negerinya. Swedia memang memiliki cadangan batu bara dan uranium, namun jumlahnya tergolong sangat rendah sehingga secara ekonomis tidak layak untuk dilakukan penambangan. Ketergantungan Swedia terhadap bahan bakar impor sangat terlihat menonjol pada akhir tahun 1930-an, ketika sumber energi dari kayu tergantikan oleh batu bara dan kokas impor sebagai bahan bakar utama di era industrialisasi. Namun, selama Perang Dunia II sebagian besar impor bahan bakar mengalami penarikan dan hanya menyisakan 30% bahan bakar yang bisa digunakan, Sehingga Pemerintah Swedia harus menangani krisis dengan segera yaitu melalui penggunaan kembali kayu bakar dan menjatah bahan bakar fosil. Kemudian setelah pembatasan dicabut pada saat perang berakhir, konsumsi bahan bakar Swedia yang berasal dari kegiatan impor secara cepat menjadi berlipat ganda. Hingga tahun 1990-an Swedia melanjutkan kegiatan impor energinya sekitar 70% dari total konsumsi energi yang digunakan yang sebagian besar adalah minyak.

Sebagian besar gas alam yang dikonsumsi oleh Swedia berasal dari kegiatan impor yang dilakukannya dengan negara tetangganya, yaitu Denmark. Selain itu, impor juga dilakukan melalui kebijakan pasar Eropa yang pemasok utamanya adalah Rusia dan sisanya Timur Tengah, Aljazair, dan Afrika Selatan. Tentu saja ketergantungan tersebut disadari oleh pemerintah Swedia. Sehingga Pemerintah

Swedia harus selalu menyiapkan penilaian resiko, rencana darurat maupun tindakan pencegahan, serta mengantisipasi kemungkinan terburuk akan terjadinya penurunan pasokan gas dari negara eksportir. Selain itu, perlu dilakukan diversifikasi pasokan gas demi terjaganya keamanan pasokan energi tersebut.

Terjadinya embargo minyak pada tahun 1973, mendorong Swedia untuk menerapkan kebijakan energi baru yang lebih independen dengan dua sasaran utama, yaitu mengurangi ketergantungan minyak dan mengembangkan sumber energi domestik yang terbarukan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menekankan terjaminnya pasokan energi dalam jangka panjang dengan menerapkan program-program energi yang komprehensif, antara lain, pedoman untuk persediaan listrik yaitu, membatasi perluasan PLTA, melanjutkan pengembangan nuklir, dan meningkatkan pembangkit listrik. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi ketergantungan minyak baik melalui kampanye yang masif ataupun pesan yang disampaikan lewat media. Sekitar tahun 1981, setelah berhasilnya kampanye yang dilakukan, pemerintah membuat kebijakan energi baru yang komprehensif. Sasaran pengurangan konsumsi minyak dari 70% ke 40% akhirnya berhasil dicapai oleh Swedia pada tahun 1983. Selain itu, permintaan energi Swedia mengalami penurunan yang sangat mengesankan, dibuktikan dengan data statistik yang ditunjukkan oleh NUTEK bahwa penggunaan jumlah energi untuk pemanas perumahan pada tahun 1990 setara dengan penggunaan pada tahun 1970 kendati jumlah perumahan telah mengalami peningkatan hingga 28%. Konsumsi energi untuk industri juga mengalami penurunan hingga 14% meskipun produksi meningkat 17%. Namun demikian, dalam hal transportasi, konsumsi energi terus mengalami peningkatan hingga mencapai 40% terhitung sejak tahun 1970.

Sumber energi utama milik domestik Swedia adalah hydropower, biomass dan angin. Selain itu sejak tahun 1955 Swedia mulai menggunakan reaktor nuklir untuk mengamankan ketersediaan pasokan energi dalam jangka panjang. Inisiatif tersebut datang setelah dilaksanakannya konferensi Jenewa tahun 1955 yang dikenal dengan kebijakan “*swedish line*”. Kendati sering menuai kontroversi, hal tersebut terpaksa dilakukan oleh Pemerintah Swedia karena resiko terganggunya

pasar minyak sebagai resiko perang yang dimanifestasikan oleh Timur Tengah. Terlebih lagi saat itu, sumber daya domestik yang dimiliki Swedia hanya hidroelektrik. Sedangkan ketersediaan sumber energi eksternal hanyalah petroleum.

Langkah awal dari penggunaan nuklir telah menunjukkan sesuatu yang benar-benar gagal. Para teknokrat yang mendesain penggunaan jenis reaktor air-berat dengan biji uranium yang kurang berkualitas. Saat itu pabrik reaktor air-berat dibangun di Marviken, dan akhirnya membutuhkan buruh, modal, teknisi, dan uranium. Pengadaan reaktor tersebut akhirnya menunjukkan betapa mahal biaya yang dikeluarkan pemerintah, ditambah lagi dengan seringkali terjadinya masalah teknis, dan percobaan yang membawa ketakutan serta kecelakaan. Beberapa hal tersebut akhirnya menyebabkan pemerintah memutuskan untuk menutup reaktor sebelum dioperasikan pada tahun 1970. Setelah itu pemilik yang mengoperasikan pabrik di Marviken mengganti bahan bakar reaktor dengan minyak, yang akhirnya mengundang banyak kritik bahwa Marviken adalah satu-satunya stasiun nuklir power yang berbahan bakar minyak di dunia. Percobaan lain dilakukan di daerah pinggiran Kota Stockholm, Agesta yaitu operasi stasiun nuklir berbahan bakar pertama dalam suatu pabrik kecil yang didesain untuk memproduksi panas dan bukan listrik selama 10 tahun. Namun demikian, biaya yang dikeluarkan tujuh kali lebih mahal dari perkiraan awal. Akhirnya pada tahun 1974, stasiun nuklir tersebut ditutup karena pada saat itu harga minyak mengalami kenaikan. Satu-satunya teknologi nuklir yang berhasil dioperasikan dengan skala penuh yaitu di Oskarshamn oleh ASEA, yang didirikan sekitar tahun 1960an dengan menggunakan reaktor jenis air-ringan. Swedia semakin mengalami kesuksesan besar dalam mendirikan tenaga nuklirnya setelah bekerjasama dengan perusahaan Amerika. terdapat sekitar 12 reaktor nuklir yang dibangun yang selesai pada tahun 1985.

Sampai saat ini terdapat 9 reaktor nuklir yang dijalankan oleh sebagai penghasil 40% listrik yang disediakan untuk warganya. Nuklir tetap menjadi perdebatan yang kontroversial di kalangan masyarakat Swedia meskipun dampak emisiasi gas rumah kaca yang dihasilkan nuklir lebih rendah. Bahkan pada tahun

1980 sebuah referendum untuk menutup nuklir diadakan, dan pemerintah secara bertahap menutup sedikit demi sedikit. Namun kemudian, setelah tiga puluh tahun lamanya, beberapa tahun terakhir pemerintah Swedia mencabut larangan pembangunan nuklir dengan alasan keamanan pasokan energi. Karena Swedia memang memiliki segmen teknik dan manufaktur terkemuka dan cukup besar, seperti kendaraan bermotor, telekomunikasi, farmasi, mesin industri, peralatan presisi, barang kimia, peralatan rumah tangga, kehutanan, besi dan baja. Sehingga kebutuhan energinyapun sejalan dengan hal tersebut. Melalui berbagai perdebatan pemerintah dengan partai oposisi, akhirnya keduanya menyetujui untuk melakukan pemotongan pajak secara bertahap yang sebelumnya diterapkan untuk pembangunan nuklir. Kendati demikian, pemerintah Swedia masih memiliki tujuan untuk mencapai energi terbarukan hingga 100% (Erickson, 1997: 19).

3.2.2 Kebijakan Makro Swedia dalam Lingkup Regional Uni Eropa Terkait Keamanan Energi

Signifikansi dari keamanan energi Eropa dalam agenda politik Uni Eropa mengalami peningkatan. Hal ini merupakan pengaruh dari beberapa faktor yaitu, produksi sumber daya hidrokarbon Eropa cenderung mengalami penurunan, ketergantungan UE terhadap pasokan energi dari luar, tidak stabilnya harga energi global, dan masalah dalam pasar energi internal yang terfragmentasi dibenua Eropa. Terlebih lagi saat ini persaingan sumber energi global semakin ketat karena munculnya aktor ekonomi baru yang kuat seperti Brazil, China dan India ditambah dengan tindakan Rusia dalam pemanfaatan “diplomasi energi” yang mempengaruhi keamanan energi Eropa sampai batas tertentu (Mammadli, 2012).

Selama ini Uni Eropa hanya memiliki satu sumber ketergantungan untuk energi. Oleh karenanya, saat terjadi krisis gas antara Rusia dan Ukraina pada bulan Januari 2006, hal tersebut terindikasi menjadi resiko bagi kelangsungan kebutuhan energi Uni Eropa. terulangnya kejadian yang serupa yaitu aliran gas dan minyak Rusia ke Belarus, Georgia dan Ukraina menjadi perdebatan sengit di kalangan elit politik Eropa bahwa Rusia sebagai produsen gas terbesar di dunia sekaligus mitra energi Uni Eropa memiliki keandalan dalam mengontrol kepentingan politiknya dengan memainkan kartu energi. Sengketa gas yang terjadi

antara Rusia-Ukraina mengingatkan Uni Eropa mengenai diversifikasi sumber energi dan jalur transportasinya. Bagi UE sangat penting untuk menggambarkan alternatif diversifikasi sumber energinya. Alternatif itu terdiri dari beberapa negara di Timur Tengah, perhatian khusus diberikan pada Qatar, Afrika Utara (Aljazair, Mesir dan Libya) dan cekungan Kaspia (Kazakhstan, Turkmenistas dan Azerbaijan).

Peristiwa yang berkaitan dengan persoalan energi telah memainkan peran penting dalam pembentukan Komunitas Eropa (EC) dan sub-sub komunitas di dalamnya seperti, Komunitas Baja dan Batu Bara Uni Eropa (ECSC) dan Komunitas Energi Atom Uni Eropa yang didirikan pada tahun 1950-an. Keduanya sangat berkontribusi besar dalam menyediakan pasokan konsumsi energi negara anggota Uni Eropa pada saat itu. batu bara menjadi konsumsi terbesar pada saat itu hingga mencapai 80% dari keseluruhan pasokan energi Uni Eropa, sedangkan minyak mengambil bagian sekitar 10%. Koordinasi dan kolaborasi dalam kebijakan energi oleh negara-negara Eropa tersebut dilakukan setelah menghadapi guncangan krisis minyak pada tahun 1970. Mereka mulai memberikan fokus perhatian yang besar terkait keamanan dan diversifikasi pasokan energinya (Mammadli, 2012: 4).

Badan energi internasional juga bahkan diciptakan oleh Uni Eropa sebagai respon atas embargo minyak yang dilakukan oleh Timur Tengah. Badan Energi Internasional atau Internasional Energy Agency (disingkat IEA) merupakan suatu badan otonom yang didirikan pada bulan November tahun 1974. Terdapat dua tugas utama dari badan otonom ini yaitu, untuk mempromosikan keamanan energi di antara negara-negara anggotanya dengan cara menanggapi secara kolektif setiap gangguan fisik dalam pasokan minyak mereka, dan menyediakan penelitian dan analisis otoritatif mengenai cara untuk memastikan energi yang andal, terjangkau dan bersih untuk 28 negara anggotanya dan seterusnya. IEA melaksanakan program kerjasama energi yang komprehensif di antara negara-negara anggotanya, yang masing-masing diwajibkan untuk memegang saham minyak yang setara dengan 90 hari impor bersihnya. Tujuan IEA ini mencakup sasaran berikut:

1. Mengamankan akses negara anggota ke persediaan yang dapat diandalkan dan banyak dari semua bentuk energi; khususnya, dengan mempertahankan kemampuan tanggap darurat yang efektif jika terjadi gangguan pasokan minyak.
2. Mempromosikan kebijakan energi berkelanjutan yang memacu pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam konteks global - terutama dalam hal mengurangi emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.
3. Meningkatkan transparansi pasar internasional melalui pengumpulan dan analisis data energi.
4. Mendukung kolaborasi global mengenai teknologi energi untuk menjamin pasokan energi masa depan dan mitigasi dampak lingkungan mereka, termasuk melalui peningkatan efisiensi dan pengembangan energi dan penerapan teknologi rendah karbon.
5. Temukan solusi untuk tantangan energi global melalui keterlibatan dan dialog dengan negara-negara non-anggota, industri, organisasi internasional dan pemangku kepentingan lainnya.

Swedia sendiri telah menjadi negara anggota Uni Eropa sejak tahun 1995. Kerangka kerja Uni Eropa menetapkan persyaratan legal untuk Swedia sebagai negara anggotanya dalam kebijakan energi Swedia. Kebijakan tersebut berkaitan erat dengan pasar gas dan listrik, efisiensi energi, energi terbarukan, perpajakan produk energi, subsidi, lingkungan dan emisi gas rumah kaca. Oleh sebab itu, Swedia diwajibkan untuk menerapkan setiap kebijakan energi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.

Kebijakan energi Swedia dipandu oleh program pemerintah yang telah disetujui oleh parlemen Swedia pada tahun 2009. Program yang pertama, *integrated climate and energy policy* atau kebijakan energi dan iklim yang terintegrasi yaitu program yang menetapkan target dalam mendukung sasaran Uni Eropa untuk 2020 dalam mengejar kebijakan yang berkelanjutan bagi lingkungan, yang berdaya saing dan memiliki stabilitas jangka panjang.

Berikut ini target dalam jangka pendek hingga menengah untuk 2020 :

- Pengurangan emisi gas rumah kaca hingga 40% atau setara dengan 20 juta ton karbon dioksida, dengan perbandingan di tahun 1990, yang akan dicapai di luar Skema Perdagangan Emisi Uni Eropa (UE-ETS) dengan sebanyak dua pertiga di wilayah Swedia dan satu pertiga sebagai investasi di negara-negara Uni Eropa lainnya atau penggunaan mekanisme yang fleksibel.
- Mencapai paling sedikit 50% dari pangsa energi terbarukan dalam konsumsi energi akhir jumlah kotor.
- Mencapai paling sedikit 10% pangsa energi terbarukan dalam bidang transportasi.
- Mencapai lebih dari 20% penggunaan energi secara efisien dengan perbandingan pada tahun 2008.

Sedangkan prioritas jangka panjang untuk kebijakan energi dan iklim yang terintegrasi, antara lain :

- Menjelang 2020, Swedia berupaya mengurangi secara bertahap bahan bakar fosil yang digunakan sebagai bahan bakar pemanas.
- Menjelang tahun 2030, Swedia harus memiliki persediaan kendaraan yang tidak tergantung pada bahan bakar fosil.
- Swedia berkomitmen untuk mengembangkan pilar ketiga kedalam pasokan listrik, setelah tenaga nuklir dan air, dengan meningkatkan penggabungan energi penghasil listrik dan panas, tenaga angin dan produksi tenaga terbarukan lainnya untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan keamanan pasokan listrik.
- Menjelang 2050, visi Swedia adalah akan memiliki pasokan sumber energi terbarukan yang efisien dan berkelanjutan dengan emisi bersih gas rumah kaca mencapai jumlah nol (Poblocka, et al.,2014).

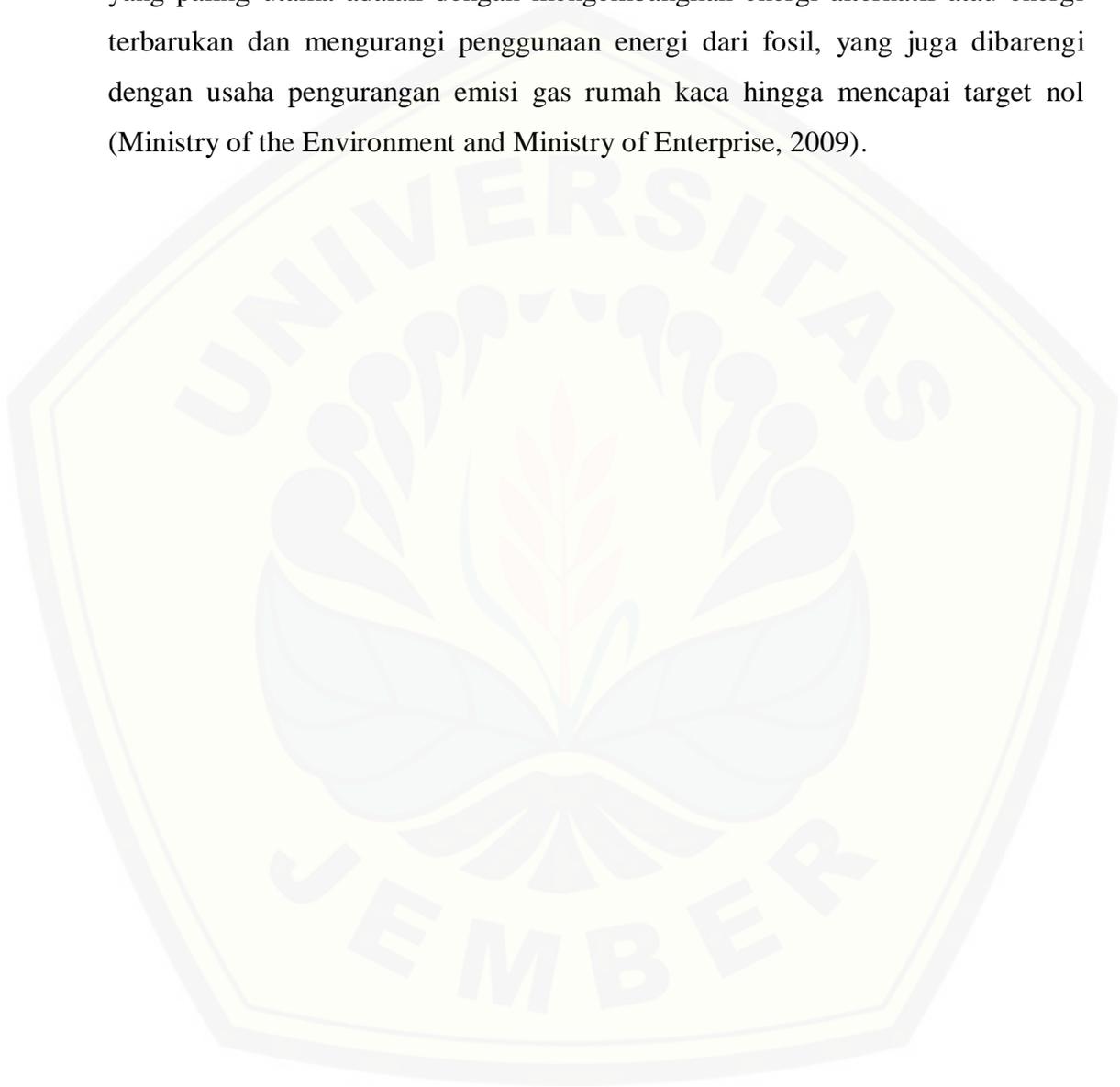
Sebagai negara anggota Uni Eropa, otomatis Swedia secara langsung berada di bawah payung peraturan dan perintah Uni Eropa di bidang efisiensi energi. Perintah terkait Berakhirnya Efisiensi Penggunaan Energi dan Layanan Energi 2006/32/EC (Perintah Layanan Energi Uni Eropa) menetapkan langkah-langkah

untuk efisiensi energi dari keseluruhan sektor, termasuk sektor publik, dan memerlukan rencana aksi efisiensi energi nasional dan bertujuan untuk menciptakan pasar bagi layanan energi (Official Journal of the European Union, 2006). Kemudian Perintah 2010/31/EU terkait Pembangunan Kinerja Energi (EPBD) mewajibkan anggota negara Uni Eropa untuk mengadopsi persyaratan kinerja energi minimum (MEPs) untuk gedung yang baru dan sudah ada, agar sertifikasi gedung kinerja energi bisa dipastikan, kemudian pemeriksaan secara teratur terhadap sistem pemanas dan pendingin dalam gedung dan pada tahun 2021 mendatang semua gedung baru hampir merupakan gedung yang tingkatnya sudah nol energi.

Pada Peraturan Efisiensi Energi 2012/27/EU negara anggota diharuskan untuk menetapkan target penghematan energi nasional yang sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh Uni Eropa, membangun strategi jangka panjang dalam merenovasi persediaan bangunan, memastikan bahwa harga yang kompetitif disediakan bagi konsumen energi terakhir, mengawasi potensi bagi penggabungan energi penghasil listrik dengan efisiensi yang tinggi serta pemanas dan pendingin distrik. Peraturan tersebut mewajibkan penyedia energi untuk mencapai penghematan penggunaan energi yang setara dengan 1,5% penjualan energipertahun selama periode tahun 2014 hingga tahun 2020 dan mewajibkan seluruh perusahaan besar untuk menjalani pemeriksaan keuangan setiap empat tahun sekali. Perintah 2009/125/EC terkait Pengaturan Desain Eco untuk Produk yang berhubungan dengan energi (Eco-design Directive) mempromosikan efisiensi energi sepanjang siklus berjalannya produk dan merupakan basis untuk standart produk tertentu di masa mendatang yang ditetapkan oleh peraturan Uni Eropa. Perintah 2010/30/EU Pelabelan Konsumsi Energi termasuk perintah pelabelan yang diharuskan bagi iklan dan industri peralatan rumah tangga dan yang berhubungan dengan energi. Kemudian Regulasi (EC) No 1222/2009 terkait pelabelan terhadap ban melengkapi upaya untuk sektor transportasi .

Selain berbagai peraturan atau perintah yang ditetapkan diatas, Swedia juga berkomitmen untuk mengurangi intensitas energinya hingga 20% antara tahun 2008 hingga tahun 2020 mendatang yang juga dibawah payung peraturan Uni

Eropa dan masih ada segelintir peraturan lainnya yang berkaitan dengan persoalan energi. Namun, inti dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan adalah bahwa Swedia maupun Uni Eropa atau negara anggota di dalamnya, di dalam kebijakan energinya yang luas bertujuan untuk mencapai efisiensi energi yang berkelanjutan dengan memperhatikan pemeliharaan lingkungannya. Salah satu bentuk efisiensi yang paling utama adalah dengan mengembangkan energi alternatif atau energi terbarukan dan mengurangi penggunaan energi dari fosil, yang juga dibarengi dengan usaha pengurangan emisi gas rumah kaca hingga mencapai target nol (Ministry of the Environment and Ministry of Enterprise, 2009).



BAB 5 KESIMPULAN

Urgensi dari dilakukannya impor sampah yang semakin intens oleh Swedia adalah untuk memenuhi kebutuhan energi domestiknya melalui perubahan sampah menjadi energi. Secara garis besarnya, Hal tersebut dikarenakan Swedia merupakan negara yang miskin akan sumber daya energi fosil dalam wilayah domestiknya. Selama ini Swedia sangat bergantung pada energi yang disediakan dari Wilayah Laut Utara terutama energi minyak. Wilayah Laut Utara merupakan pemasok vital bagi Swedia. Namun, awal tahun 2000-an wilayah tersebut mengalami *peak oil* yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi energi dan bahkan memicu kenaikan harga minyak. Kemudian, Rusia menggantikan perannya yang cukup dominan pada awal tahun tersebut, namun gejolak politik antara Rusia dan wilayah pendistribusi telah mengganggu pendistribusian energi ke Eropa yang menyebabkan penurunan tingkat ekspor energinya ke Swedia. Tahun 2011 menjadi tahun yang sibuk bagi Swedia karena dihadapkan oleh beberapa gangguan tersebut.

Ketergantungan dalam menggunakan minyak pada awal industrialisasi yang berat di Swedia sebelumnya, telah menyebabkan Swedia menjadi negara yang kotor, memiliki tingkat polusi udara dan pencemaran air yang tinggi, serta masalah lingkungan lainnya. Dari peristiwa-peristiwa tersebut, timbul aksi politik yang menghimbau kerjasama antar otoritas dan industri swasta lokal, regional, nasional dan bahkan warga sipil juga dilibatkan. Secara bertahap perusahaan-perusahaan mulai merubah wacana keberlanjutan untuk direalisasikan, menemukan cara baru dalam menangani masalah lingkungan. Pergeseran energi fosil ke energi bersih menjadi strategi yang diterapkan Swedia untuk solusi yang fleksibel. Sampah yang diimpor diubah ataupun menghasilkan energi melalui beberapa metode manajemen sampah di Swedia yaitu, *perbaikan ke energi* dan *perawatan secara biologis*. Perbaikan ke energi dilakukan dengan teknologi *Waste-to-energy* sedangkan perawatan secara biologis dilakukan dengan teknik *Anaerobic Digestion*. Keduanya menghasilkan energi yang memiliki tingkat emisi

CO₂ yang sangat rendah dibandingkan tingkat emisi yang dihasilkan energi dari fosil, sehingga energi dari sampah dikategorikan ke dalam jenis *clean energy*.

Pergeseran mode energi untuk pemenuhan kebutuhan energi dari sampah tersebut merupakan pengaruh politik hijau yang diartikulasikan dari gerakan *Miljöpartiet de Gröna* dalam menaikkan isu lingkungan. Dampak lingkungan yang dihasilkan oleh industrialisasi berat dalam pembangunan di Swedia pasca Perang Dunia II telah mendorong kontestasi isu lingkungan yang digerakkan oleh Kelompok Hijau menjadi dominan pada awal tahun 1980-an. Kemenangan isu lingkungan untuk menjadi isu terkuat yang pernah ada sejak tahun 1980-an telah membawa pada keberhasilan MP dalam memasuki parlemen sejak tahun 1988, terutama setelah berkoalisi dengan partai terbesar di Swedia Sosial Demokrat. Hal tersebut kemudian melancarkan aksi *lobbying* MP dengan pemerintah. Dengan moto “Modernizing Sweden” yang salah satunya memusatkan perhatian pada bidang energi, MP berhasil membawa program-programnya ke pemerintahan. Sasaran mencapai 100% *Renewable Energy* merupakan salah satu pencapaian terbesar MP yang mendorong banyaknya investasi terhadap pengembangan energi terbarukan di Swedia, dengan tujuan untuk menggeser energi fosil ke energi terbarukan. Hal ini sangat berkorelasi dengan pengubahan sampah ke energi sebagaimana yang disampaikan MP secara langsung pada point ketiga dan keempat dari Kongres Partai-nya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barry, John. 2014. *Green Political Theory* (4th Edition ed.). London: Routledge.
- Burchill, S., & Linklater, A. 1996. *Theories of International Relation*. New York: ST Martin's Press.
- Chandler, A. J dkk. 1997. *MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATOR RESIDUES*. Amsterdam: ELSEVIER.
- Charles, A. McClelland. 1986. *Ilmu Hubungan Internasional: Teori dan Sistem*. Jakarta: CV Rajawali.
- Cherp, A., & Jewell, J. 2013. *Energy security assessment framework and three case-studies*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
- Dreblow, Eike dkk. 2014. *Assessment of climate change policies in the context of the European Semester*. Berlin: Ecologic Institute.
- Erickson, Rita J. 1997. *"Paperor Plastic?" (Energy, Environment, and Consumerism in Sweden and America)*. Westport: Praeger Publisher.
- Haute, Emilie V. 2016. *Green Parties in Europe*. New York: Routledge.
- Hogan, E. P., & Hogan, J. M. 2006. *Sweden*. New York: Chelsea House Publisher.
- Mas'ood, M. 1990. *ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Nugroho, H. 2001. *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Orr, Tamra B. 2010. *Environmentalist*. Michigan: Cherry Lake Publishing.

Perwita, A. A., & Yani, Y. M. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Richardson, D., & Rootes, C. 1995. *The Green Challenge (The Development of Green Parties in Europe)*. London: Routledge.

Reynolds, Andrew dkk. 2005. *International Institute fo Democracy and Electoral Assistance*. Stockholm : International IDEA).

Savacool, Benjamin K. 2011. *The Routledge Handbook of Energy Security*. New York: Routledge.

Jurnal

Apriwan. 2011. *The Politics of Global Environment*. MULTIVERSA Journal of International Studies. No. 1, Vol. 02.

Höök, M dkk. 2014. *Evaluation and update of Norwegian and Danish oil production forecasts and implications for Swedish oil import*. Global Energy System. No. 333-345, Vol. 65.

Yergin, Daniel. 2006. *Ensuring Energy Security*. FOREIGN AFFAIRS. No. 2, Vol. 85.

Skripsi

Kuslyaykina, Dina. 2013. *Exploratory Study of Waste Generation and Waste Minimization in Sweden*. Department of Earth Sciences. Uppsala University.

Labandeira, X., & Manzano, B. 2012. *Some Economic Aspects of Energy Security*. Department of Economics for Energy. University of Vigo.

Mammadli, Ilkin. 2012. *European Energy Security: Prospects of the Caspian basin*. Department of Political Science, Lund University.

Laporan

Berglund, Josefin. 2018. *Swedish Waste Management 2011*. Malmö: Avfall Sverige.

Berglund, Josefin. 2018. *Swedish Waste Management 2012*. Malmö: Avfall Sverige.

Berglund, Josefin. 2018. *Swedish Waste Management 2013*. Malmö: Avfall Sverige.

Berglund, Josefin. 2018. *Swedish Waste Management 2014*. Malmö: Avfall Sverige.

Berglund, Josefin. 2018. *Swedish Waste Management 2015*. Malmö: Avfall Sverige.

Berglund, Josefin. 2018. *Swedish Waste Management 2016*. Malmö: Avfall Sverige.

Berglund, Josefin. 2018. *Swedish Waste Management 2017*. Malmö: Avfall Sverige.

Berglund, Josefin. 2018. *Swedish Waste Management 2018*. Malmö: Avfall Sverige.

Hoorweg, Daniel & Bhada-Tata, Perinaz. 2012. *What a Waste : A Global Review of Solid Waste Management*. Washington, Dc: The World Bank Group.

Lorentzon, Sten. 2015. *The 10 Largest Countries Producing Nuclear Energy in 2003*. Gothenburg : Centre for Regional Analysis

Marshall, J dkk. 2016. *World Energy Resources - Waste to Energy 2016*. London: The World Energy Council.

Midwest Research Institute. 1995. *Environmental Legislation and the Regulation of Waste Management in Sweden*. Colorado: National Renewable Energy Laboratory.

Milios, Leonidas. 2013. *Municipal waste management in Sweden*. Copenhagen: European Environment Agency.

Westin, Jenny. 2018. *Household Waste Treated 1975-2017*. Malmö: Avfall Sverige.

Westin, Jenny. 2018. *Import Forbr 2004-2017*. Malmö: Avfall Sverige.

Internet

Allmendinger, R. W. 2007. *Cornell University Energy Studies in the College of Engineering*. Diakses dari http://www.geo.cornell.edu/eas/energy/the_challenges/peak_oil.html pada 5 Desember 2017

American Chemical Society. 2017. *Chloroflourocarbons and Ozone Depletion*. Diakses dari <https://www.acs.org/content/acs/en/education/whatischemistry/landmarks/cfcs-ozone.html> pada 7 Desember 2017

Avfall Sverige. 2006. *Towards a Greener Future with Swedish Waste-to-energy The world's Best Example*. Diakses dari http://large.stanford.edu/courses/2016/ph240/ladow1/docs/forbranning_eng.pdf pada 4 April 2018

Avfall Sverige. 2017. *Avfall Sverige – The Swedish Waste Management Association*. Diakses dari <https://www.avfallsverige.se/in-english/> pada 9 Desember 2017

BBC News. 2018. *Sweden Profile*. Diakses dari <https://www.bbc.com/news/world-europe-17955808> pada 5 November 2018

Braw, Elisabeth. 2015. *Dirty Power : Sweden wants your garbage for energy*. Diakses dari <http://america.aljazeera.com/articles/2015/3/27/sweden-wants-your-garbage-for-energy.html> pada 6 Desember 2017

- CEIC. 2017. *Sweden's Oil Consumption from 2006-2017*. Diakses dari <https://www.ceicdata.com/en/indicator/sweden/oil-consumption> pada 15 Januari 2019
- Chan, K., W. 2017. *From Trash to Treasure: Sweden's Recycling Revolution*. Diakses dari <https://www.blueoceanstrategy.com/blog/trash-treasure-sweden-recycling-revolution/> pada 15 Januari 2019
- Conserve Energy Future. 2019. *What is Peak Oil?*. Diakses dari <https://www.conserve-energy-future.com/what-is-peak-oil.php> pada 14 Januari 2018
- Dickson, D., & Adomaitis, N. 2016. *Sweden's deal leaves door to nuclear power open, but only just*. Diakses dari <https://www.reuters.com/article/sweden-nuclearpower-idUSL8N19E2VM> pada 24 Desember 2018
- Duxbury, Charlie. 2017. *Swedish Greens get the coalition blues*. Diakses dari <https://www.politico.eu/article/swedish-greens-get-the-coalition-blues/> pada 24 Desember 2018
- EPA Victoria. 2016. *Act Administered by EPA*. Diakses dari <https://www.epa.vic.gov.au/about-us/legislation/acts-administered-by-epa> pada 27 Februari 2018
- EPA. 2017. *International Agreements on Transboundary Shipments of Hazardous Waste*. Diakses dari <https://www.epa.gov/hwgenerators/international-agreements-transboundary-shipments-hazardous-waste> pada 26 Februari 2018
- European Commission. 2017. *The Role of Waste-to-Energy in the Circular Economy*. Diakses dari <http://ec.europa.eu/environment/waste/waste-to-energy.pdf> pada 15 Januari 2019
- Global Green. 2018. *Miljöpartiet de Gröna (Swedish Green Party)*. Diakses dari <https://www.globalgreens.org/party/Green-party-sweden> pada 18 April 2018
- Government Offices of Sweden. 2017. *How Sweden is governed*. Diakses dari <http://www.government.se/how-sweden-is-governed/> pada 4 Januari 2018

- Green Party of Washington. 2017. *The Green Party's Ten Key Values*. Diakses dari <https://greenpartywashington.org/about/10-key-values/> pada 5 Desember 2017
- Green Party US. 2016. *Ten Key Values*. Diakses dari http://www.gp.org/ten_key_values_2016 pada 5 Desember 2017
- IEA. 2017. *Energy Security*. Diakses dari <https://www.iea.org/topics/energysecurity/> pada 27 November 2017
- Jones, Sophia. 2012. *The Two-Way : Sweden Wants Your Trash*. Diakses dari <https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2012/10/28/163823839/sweden-wants-your-trash> pada 7 Juni 2018
- KBBI Daring. 2016. *Urbanisasi*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Urbanisasi> pada 5 Desember 2017
- Ko, Malcolm K.W dkk. 1993. *Global Warming From Chlorofluorocarbons and Their Alternatives : Time Scales of Chemistry and Climate*. California : UC Irvine. diakses dari <https://escholarship.org/uc/item/0b34j525> pada 8 Desember 2017
- Lipman, Zada. 2011. *Trade in Hazardous Waste: Environmental Justice Versus Economic Growth*. Diakses dari <http://archive.ban.org/library/lipman.html> pada 10 Desember 2017
- Lördag. 2016. *Green Party meets to review refugee policies*. Diakses dari <https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=6378271> pada 24 Desember 2018
- Ministry of the Environment and Ministry of Enterprise. (2009). *An integrated climate and energy policy: Climate and Energy Policy for a Sustainable Future*. Diakses dari <https://www.sametinget.se/10183> pada 8 Oktober 2018
- Murphy, Lauren. 2017. *Sweden's Strange Problem: Not Enough Trash*. Diakses dari <https://earth911.com/business-policy/sweden-trash-problem/> pada 27 Februari 2018

- Nicastro, Christopher. 2017. *Sweden's Recycling (D)evolution*. Diakses dari <https://zerowasteurope.eu/2017/06/swedens-recycling-devolution/> pada 10 Maret 2018
- Nicholsaon, Walter. 1999. *Pengertian Eksternalitas*. Diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/8151/3/bab%202.pdf> pada 14 Januari 2019
- Nyström, A, K. 2012. *Swedish waste statistics*. Diakses dari https://unstats.un.org/unsd/environment/fdes/EGES3/6Sweden_Swedish%20waste%20statistics.pdf pada 6 Maret 2018
- OECD. 2013. *Green Growth in Stockholm, Sweden*. Diakses dari <https://international.stockholm.se/globalassets/ovriga-bilder-och-filer/green-growth-in-stockholm.pdf> pada 14 Januari 2019
- OECD. 2017. *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*. Diakses dari <http://www.oecd.org/about/> pada 5 Desember 2017
- OECD. 2017. *List of OECD Member Countries – Ratification of the Convention on the OECD*. Diakses dari <http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm> pada 14 November 2017
- OECD.stat. 2018. *Detail of Tax Revenue – Sweden*. Diakses dari <https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REVSWE> pada 15 Januari 2019
- Official Journal of the European Union. 2006. *DIRECTIVE 2006/32/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 April 2006*. Diakses dari <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0032&from=EN> pada 19 Juni 2018
- Reichel, Almut. 2014. *Europe's objective: recycle more waste and send less to landfills*. Diakses dari <https://www.eea.europa.eu/articles/europe2019s-objective-recycle-more-waste> pada 10 Maret 2018
- Sheffield, Hazel. 2016. *Sweden's recycling is so revolutionary, the country has run out of rubbish*. Diakses dari <https://www.independent.co.uk/environment/sweden-s-recycling-is-so->

revolutionary-the-country-has-run-out-of-rubbish-a7462976.html pada 27 November 2017

SVERIGES RIKSDAG. 2019. *A guide to the Swedish Parliament*. Diakses dari <https://riksdagen.se/globalassets/15.-bestall-och-ladda-ned/andra-sprak/guide-sveriges-riksdag-eng-1612.pdf> pada 14 Januari 2019

Swedish Energy Agency. 2009. *Waste-to-Energy in Sweden - Suppliers of Sustainable Solutions*. Diakses dari http://www.disperator.se/sites/default/files/waste_to_energy_in_sweden.pdf pada 12 November 2018

Swedish Institute. 2013. *The Swedish Monarchy*. Diakses dari <https://sweden.se/society/the-swedish-monarchy/> pada 14 Januari 2019

Swedish Green Party. 2017. *We want to built a sustainable society, that takes on climate change while creating new job*. Diakses dari <https://www.mp.se/languages> pada 4 Januari 2018

The Swedish Institute. 2014. *The Swedish System of Government*. Diakses dari <http://sharingsweden.se/wp-content/uploads/2015/06/Government-low-res.pdf> 4 Januari 2018

The Swedish Institute. 2017. *Political Parties in Sweden*. Diakses dari <https://sweden.se/society/political-parties-in-sweden/> pada 3 Januari 2018

UNEP. 2011. *The Basel Convention: Controlling Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*. Diakses dari <http://www.basel.int/TheConvention/Overview/tabid/1271/Default.aspx> pada 5 Desember 2017

UNEP. 2017. *About UN Environment*. Diakses dari <https://www.unenvironment.org/about-un-environment> pada 4 Desember 2017.

United States EPA. 2019. *Basic Information about Anaerobic Digestion (AD)*. Diakses dari <https://www.epa.gov/anaerobic-digestion/basic-information-about-anaerobic-digestion-ad> pada 15 Januari 2019

US EIA. 2016. *North Sea Oil Productions*. Diakses dari <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=12751> pada 15 Januari 2019

